

PENGELOLAAN
WILAYAH
PESISIR TERPADU

SERI



2003

CONTOH

Contoh Program Pengelolaan Wilayah Pesisir di Lampung

DIETRIECH G. BENGEN
BUDY WIRYAWAN
AMIRUDDIN TAHIR

USAID - INDONESIA COASTAL RESOURCES MANAGEMENT PROJECT
KOLEKSI DOKUMEN PROYEK PESISIR 1997 - 2003

Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997 - 2003

Kutipan: Knight, M. dan S. Tighe, (editor) 2003. Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997-2003; Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode Island, USA. (5 Seri, 30 Buku, 14 CR-ROM).



Koleksi Proyek Pesisir –Kata Pengantar

Selama lebih dari 30 tahun terakhir, telah terdapat ratusan program —baik internasional, nasional maupun regional— yang diprakarsai oleh pemerintah, serta berbagai organisasi dan kelompok masyarakat di seluruh dunia, dalam upaya menatakelola ekosistem pesisir dan laut dunia secara lebih efektif. USAID (The United States Agency for International Development) merupakan salah satu perintis dalam kerja sama dengan negara-negara berkembang untuk meningkatkan pengelolaan ekosistem wilayah pesisir sejak tahun 1985.

Berdasarkan pengalamannya tersebut, pada tahun 1996, USAID memprakarsai Proyek Pengelolaan Sumberdaya Pesisir (Coastal Resources Management Project—CRMP) atau dikenal sebagai Proyek Pesisir, sebagai bagian dari program Pengelolaan Sumberdaya Alam (Natural Resources Management Program). Program ini direncanakan dan diimplementasikan melalui kerja sama dengan Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan dengan dukungan Coastal Resources Center University of Rhode Island (CRC/URI) di Amerika Serikat. Kemitraan USAID dengan CRC/URI merupakan kerja sama yang amat penting dalam penyelenggaraan program-program pengelolaan sumberdaya pesisir di berbagai negara yang didukung oleh USAID selama hampir dua dasawarsa. CRC/URI mendisain dan mengimplementasikan program-program lapangan jangka panjang yang bertujuan membangun kapasitas menata-kelola wilayah pesisir yang efektif di tingkat lokal dan nasional. Lembaga ini juga melaksanakan analisis dan berbagi pengalaman tentang pembelajaran yang diperoleh dari dan melalui proyek-proyek lapangan, lewat program-program pelatihan, publikasi, dan partisipasi di forum-forum internasional.

Ketika CRC/URI memulai aktivitasnya di Indonesia sebagai mitra USAID dalam program pengelolaan sumberdaya pesisirnya (CRMP, atau dikenal dengan Proyek Pesisir), telah ada beberapa program pengelolaan pesisir dan kelautan yang sedang berjalan. Program-program tersebut umumnya merupakan proyek besar, sebagian kecil di antaranya telah mencapai tahap implementasi. CRC/URI mendisain Proyek Pesisir untuk lebih berorientasi pada implementasi dalam mempromosikan pengelolaan wilayah pesisir dan tujuan-tujuan strategis USAID, seperti pengembangan ekonomi dan keamanan pangan, perlindungan kesehatan masyarakat, pencegahan konflik, demokrasi partisipatoris, dan perlindungan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan sumberdaya pesisir dan air.

Kegiatan Proyek Pesisir menempatkan Indonesia di garis depan pengembangan model baru dan peningkatan informasi baru yang bermanfaat bagi Indonesia sendiri dan negara-negara lain di dunia dalam hal pengelolaan sumberdaya pesisir. Sebagai negara keempat terbesar di dunia, dengan kurang lebih 60 persen dari 230 juta penduduknya tinggal di dalam radius 50 kilometer dari pesisir, Indonesia secara sempurna berada pada posisi untuk mempengaruhi dan memformulasikan strategi-strategi pengembangan pengelolaan pesisir negara-negara berkembang di seluruh dunia. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.500 pulau, 81.000 kilometer garis pantai, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 5,8 juta



CRMP/Indonesia Collection

–Preface

Over the past 30 years, there have been hundreds of international, national and sub-national programs initiated by government, organizations and citizen groups that attempted to more effectively govern the world's coastal and marine ecosystems. Among these efforts, the U.S. Agency for International Development (USAID) has been a pioneer since 1985 in working with developing countries to improve the management of their coastal ecosystem to benefit coastal people and their environment.

Building on its experience, as part of its Natural Resources Management Program, USAID initiated planning for the Indonesia Coastal Resources Management Project (CRMP, or Proyek Pesisir) in 1996. This program was planned and implemented in cooperation with the Government of Indonesia through its National Development Planning Agency (BAPPENAS) and with the support of the Coastal Resources Center at the University of Rhode Island (CRC/URI) in the United States. USAID's partnership with CRC/URI has been central to the delivery of coastal resources management programs to numerous USAID-supported countries for almost two decades. CRC/URI designs and implements long-term field programs that work to build the local and national capacity to effectively practice coastal governance. It also carries out analyses and shares experiences drawn from within and across field projects. These lessons learned are disseminated worldwide through training programs, publications and participation in global forums.

When CRC/URI initiated work in Indonesia as a partner with USAID in its international Coastal Resources Management Program, there were numerous marine and coastal programs already ongoing. These were typically large planning projects; few projects had moved forward into "on-the-ground" implementation. CRC/URI designed Indonesia's CRMP to be "implementation oriented" in promoting coastal governance and the USAID strategic goals of economic development and food security, protection of human health, prevention of conflicts, participatory democracy and environmental protection through integrated management of coasts and water resources.

The CRMP put Indonesia in the forefront of developing new models and generating new information useful in Indonesia, and in other countries around the world, for managing coastal resources. Being the fourth largest country in the world, with approximately 60 percent of its 230 million people living within 50 kilometers of the coast, Indonesia is perfectly positioned to influence and shape the coastal management development strategies of other developing countries around the world. It is the world's largest archipelago state, with 17,500 islands, 81,000 kilometers of coastline, and an Exclusive Economic Zone covering 5.8 million square kilometers of sea –more than three times its land area. Indonesia is also the richest country in the world in terms of marine bio-

kilometer laut persegi -lebih tiga kali luas daratannya. Indonesia menjadi negara terkaya di dunia dalam hal keragaman hayati (biodiversity). Sumber daya pesisir dan laut Indonesia memiliki arti penting bagi dunia internasional, mengingat spesies flora dan fauna yang ditemukan di perairan tropis Indonesia lebih banyak daripada kawasan manapun di dunia. Sekitar 24 persen dari produksi ekonomi nasional berasal dari industri-industri berbasis wilayah pesisir, termasuk produksi gas dan minyak, penangkapan ikan, pariwisata, dan transportasi. Beragam ekosistem laut dan pesisir yang ada menyediakan sumberdaya lestari bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Hasil-hasil lautnya mencukupi lebih dari 60 persen rata-rata kebutuhan bahan protein penduduk secara nasional, dan hampir 90 persen di sebagian desa pesisir. Masyarakat nelayan pedesaan cenderung menjadi bagian dari kelompok masyarakat termiskin akibat eksploitasi berlebihan, degradasi sumberdaya, serta ketidakmampuan dan kegagalan mereka memanfaatkan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan.

Di bawah bimbingan CRC/URI, Proyek Pesisir, yang berkantor pusat di Jakarta, bekerja sama erat dengan para pengguna sumberdaya, masyarakat, industri, LSM, kelompok-kelompok ilmiah, dan seluruh jajaran pemerintahan. Program-program lapangan difokuskan di Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Provinsi Lampung (sebelah selatan Sumatera) ditambah Provinsi Papua pada masa akhir proyek. Selain itu, dikembangkan pula pusat pembelajaran pada Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) di Institut Pertanian Bogor (IPB), sebagai perguruan tinggi yang menjadi mitra implementasi Proyek Pesisir dan merupakan fasilitator dalam pengembangan Jaringan Universitas Pesisir Indonesia (INCUNE).

Komponen program CRMP yang begitu banyak dikembangkan dalam 3 (tiga) lingkup strategi pencapaian tujuan proyek. Pertama, **kerangka kerja** yang mendukung upaya-upaya pengelolaan berkelanjutan, telah dikembangkan. Kemudian, ketika proyek-proyek percontohan telah rampung, **pengalaman-pengalaman dan teladan baik dari kegiatan-kegiatan tersebut didokumentasikan dan dilembagakan dalam pemerintahan**, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam jangka panjang untuk melanjutkan hasil yang sudah ada sekaligus menambah lokasi baru. Kegiatan ini dilakukan lewat kombinasi **perangkat hukum, panduan, dan pelatihan**. Kedua, Departemen Kelautan dan Perikanan yang baru berdiri didukung untuk mengembangkan **peraturan perundangan dan panduan pengelolaan wilayah pesisir nasional untuk pengelolaan pesisir terpadu yang terdesentralisasi**. Pengembangan peraturan perundangan ini dilakukan melalui suatu proses konsultasi publik yang partisipatif, terbuka dan melembaga, yang berupaya mengintegrasikan inisiatif-inisiatif pengelolaan wilayah pesisir secara vertikal dan horisontal. Ketiga, proyek ini mengakui dan berupaya **memperkuat peran khas yang dijalankan oleh perguruan tinggi dalam mengisi kesenjangan kapasitas pengelolaan wilayah pesisir**.

Strategi-strategi tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip:

- **Partisipasi** luas dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan pemberdayaan mereka dalam pengambilan keputusan
- **Koordinasi** efektif berbagai sektor, antara masyarakat, dunia usaha, dan LSM pada berbagai tingkatan
- Penitikberatan pada **pengelolaan yang terdesentralisasi** dan kesesuaian antara pengelolaan/pengaturan di tingkat lokal dan nasional
- Komitmen untuk menciptakan dan **memperkuat kapasitas organisasi dan sumberdaya manusia** untuk pengelolaan pesisir terpadu yang berkelanjutan
- Pembuatan **kebijakan yang lebih baik yang berbasis informasi dan ilmu pengetahuan**

Di **Sulawesi Utara**, fokus awal Proyek Pesisir terletak pada pengembangan praktik-praktik terbaik pengelolaan pesisir terpadu berbasis masyarakat, termasuk pembuatan dan implementasi rencana daerah perlindungan laut (DPL), daerah perlindungan mangrove (DPM), dan pengelolaan pesisir tingkat desa, serta pemantauan hasil-hasil proyek dan kondisi wilayah pesisir. Untuk melembagakan kegiatan-kegiatan yang sukses ini, dan dalam rangka memanfaatkan aturan otonomi daerah yang baru diberlakukan, Proyek Pesisir membantu penyusunan peraturan pengelolaan wilayah pesisir, baik berupa Peraturan Desa, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten, maupun Perda Provinsi. Selain itu, dikembangkan pula perangkat informasi sebagai alat bagi pengelolaan wilayah pesisir, seperti pembuatan atlas wilayah pesisir. Dalam kurun waktu 18 bulan terakhir, kegiatan perluasan program (scaling up) juga telah berhasil diimplementasikan di 25 desa pesisir di Kecamatan Likupang

diversity. Indonesia's coastal and marine resources are of international importance with more plant and animal species found in Indonesia's waters than in any other region of the world. Approximately 24 percent of national economic output is from coastal-based industries such as oil and gas production, fishing, tourism and transportation. Coastal and marine ecosystems provide subsistence resources for many Indonesians, with marine products comprising on average more than 60 percent of the protein intake by people, and nearly 90 percent in some coastal villages. Rural coastal communities tend to be among the poorest because of overexploitation and degradation of resources resulting from their inability to sustainably and successfully plan for and manage their coastal resources.

Under the guidance of CRC/URI, the Jakarta-based CRMP worked closely with resource users, the community, industry, non-governmental organizations, academic groups and all levels of government. Field programs were focused in North Sulawesi, East Kalimantan, and Lampung Province in South Sumatra, with an additional site in Papua in the last year of the project. In addition, a learning center, the Center for Coastal and Marine Resources Studies, was established at Bogor Agricultural Institute, a CRMP implementation partner and facilitator in developing the eleven-member Indonesia Coastal University Network (INCUNE).

The many components of the CRMP program were developed around three strategies for achieving the project's goals. First, **enabling frameworks** for sustained management efforts were developed. Then, as pilot projects were completed, **experiences and good practices were documented and institutionalized within government**, which has the long-term responsibility to both sustain existing sites and launch additional ones. This was done through a combination of **legal instruments, guidebooks and training**. Second, the new Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF) was supported to develop a **national coastal management law and guidelines for decentralized integrated coastal management (ICM)** in a widely participatory, transparent and now institutionalized public consultative process that attempted to vertically and horizontally integrate coastal management initiatives. Finally, the project recognized and worked to **strengthen the unique role that universities play in filling the capacity gap for coastal management**.

The strategies were based on several important principles:

- Broad stakeholder **participation** and empowerment in decision making
- Effective **coordination** among sectors, between public, private and non-governmental entities across multiple scales
- Emphasis on **decentralized governance** and compatibility between local and national governance
- Commitment to creating and **strengthening human and organizational capacity** for sustainable ICM
- Informed and **science-based decision making**

In **North Sulawesi**, the early CRMP focus was on developing community-based ICM best practices including creating and implementing marine sanctuaries, mangrove sanctuaries and village-level coastal management plans, and monitoring project results and coastal conditions. In order to institutionalize the resulting best practices, and to take advantage of new decentralized authorities, the CRMP expanded activities to include the development of village, district and provincial coastal management laws and information tools such as a coastal atlas. In the last 18 months of the project, a scaling-up program was successfully implemented that applied community-based ICM lessons learned from four original village pilot sites to Likupang sub-district (kecamatan) with 25 coastal villages. By the end of the project, Minahasa district was home to 25 community coral reef sanctuaries, five mangrove sanctuaries and thirteen localized coastal management plans. In

Barat dan Timur. Perluasan program ini dilakukan dengan mempraktikkan berbagai hasil pembelajaran mengenai pengelolaan pesisir terpadu berbasis masyarakat dari 4 lokasi percontohan awal (Blongko, Benteran, Tumbak, dan Talise). Pada akhir proyek, Kabupaten Minahasa telah memiliki 25 DPL, 5 DPM, dan 13 rencana pengelolaan pesisir tingkat desa yang telah siap dijalankan. Sulawesi Utara juga telah ditetapkan sebagai pusat regional untuk Program Kemitraan Bahari berbasis perguruan tinggi, yang disponsori oleh Departemen Kelautan dan Perikanan dan difasilitasi oleh Proyek Pesisir.

Di **Kalimantan Timur**, fokus dasar Proyek Pesisir adalah pengenalan model pengelolaan pesisir berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS), yang menitikberatkan pada rencana pengelolaan terpadu Teluk Balikpapan dan DAS-nya. Teluk Balikpapan merupakan pintu gerbang bisnis dan industri Provinsi Kalimantan Timur. Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan (RPTB) berbasis DAS yang bersifat interyurisdiksi ini merupakan yang pertama kalinya di Indonesia dan menghasilkan sebuah model untuk dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah lainnya. Rencana pengelolaan tersebut, yang dirampungkan dengan melibatkan partisipasi dan konsultasi masyarakat lokal secara luas, dalam implementasinya telah berhasil menghentikan konversi lahan mangrove untuk budidaya udang di sebuah daerah delta, terbentuknya kelompok kerja (pokja) terpadu antarinstansi untuk masalah erosi dan mangrove, terbentuknya sebuah Organisasi Non Pemerintah (Ornop) berbasis masyarakat yang pro aktif, dan jaringan Ornop yang didanai oleh sektor swasta yang berfokus pada isu-isu masyarakat pesisir. Selain itu, telah terbentuk Badan Pengelola Teluk Balikpapan, yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur berikut 3 Bupati (Penajam Paser Utara, Paser, dan Kutai Kartanegara), dan Walikota Balikpapan. Seluruh kepala daerah tersebut, bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, ikut menandatangani Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan tersebut. Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan ini telah mendorong pemerintah daerah lain untuk memulai program-program serupa. Kalimantan Timur juga telah ditetapkan sebagai pusat regional untuk Program Kemitraan Bahari berbasis perguruan tinggi, yang disponsori oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, dan difasilitasi oleh Proyek Pesisir.

Di **Lampung**, kegiatan Proyek Pesisir berfokus pada proses penyusunan rencana dan pengelolaan strategis provinsi secara partisipatif. Upaya ini menghasilkan Atlas Sumberdaya Pesisir Lampung, yang untuk pertama kalinya menggambarkan kualitas dan kondisi sumberdaya alam suatu provinsi melalui kombinasi perolehan informasi terkini dan masukan dari 270 stakeholders setempat, serta 60 organisasi pemerintah dan non pemerintah. Atlas tersebut menyediakan landasan bagi pengembangan sebuah rencana strategis pesisir dan program di Lampung, dan sarana pembelajaran bagi Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB, yang telah menangani program pengelolaan pesisir di Lampung. Sebagai contoh kegiatan pelaksanaan awal tingkat lokal dari Rencana Strategis Pesisir Provinsi Lampung, dua kegiatan berbasis masyarakat telah berhasil diimplementasikan. Satu berlokasi di Pematang Pasir, dengan titik berat pada praktik budidaya perairan yang berkelanjutan, dan yang lainnya berlokasi di Pulau Sebesi di Teluk Lampung, dengan fokus pada pembentukan dan pengelolaan daerah perlindungan laut (DPL). Model Atlas Sumberdaya Pesisir Lampung tersebut belakangan telah direplikasi oleh setidaknya 9 (sembilan) provinsi lainnya di Indonesia dengan menggunakan anggaran provinsi masing-masing.

Di **Papua**, pada tahun terakhir Proyek Pesisir, sebuah atlas pesisir untuk kawasan Teluk Bintuni - yang disusun berdasarkan penyusunan Atlas Lampung-telah diproduksi. Kawasan ini merupakan daerah yang lingkungannya sangat penting, yang tengah berada pada tahap awal aktivitas pembangunan besar-besaran. Teluk Bintuni berlokasi pada sebuah kabupaten baru yang memiliki sumberdaya alam melimpah, termasuk cadangan gas alam yang sangat besar, serta merupakan daerah yang diperkirakan memiliki paparan mangrove terbesar di Asia Tenggara. Proses penyusunan atlas sumberdaya pesisir kawasan Teluk Bintuni ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan Ornop lokal, perusahaan minyak BP, dan Universitas Negeri Papua (UNIPA). Kegiatan ini mengawali sebuah proses perencanaan partisipatif dan pengelolaan pesisir terpadu, yang mengarah kepada mekanisme-mekanisme perencanaan partisipatif untuk sumberdaya pesisir di kawasan tersebut. Para mitra-mitra lokal telah menunjukkan ketertarikan untuk menggunakan Atlas Teluk Bintuni sebagai rujukan awal (starting point) dalam mengembangkan 'praktik-praktik terbaik' mereka sendiri, misalnya pengelolaan pesisir berbasis masyarakat dan pengelolaan teluk berbasis DAS bagi Teluk Bintuni.

the last few months, due to its significant capacity in coastal management, North Sulawesi was inaugurated as a founding regional center for the new national university-based Sea Partnership Program sponsored by the MMAF and facilitated by the CRMP.

In **East Kalimantan**, the principal CRMP focus was on introducing a model for watershed-based coastal management focusing on developing an integrated coastal management plan for Balikpapan Bay and its watershed. Balikpapan Bay is the commercial and industrial hub of East Kalimantan Province. The resulting inter-jurisdictional watershed-based Balikpapan Bay Management Plan (BBMP) was the first of its kind in Indonesia and provides a model for other regional governments. The BBMP, completed with extensive local participation and consultation, has already resulted in a moratorium on shrimp mariculture in one delta region, the creation of mangrove and erosion interdepartmental working groups, a new proactive community-based NGO and a NGO-network supported by private sector funding that is focused on coastal community issues. The BBMP also resulted in the formation of the Balikpapan Bay Management Council, chaired by the Provincial Governor and including the heads of three districts (Panajam Paser Utara, Pasir and Kutai Kartengara), the Mayor of the City of Balikpapan and the Minister of Marine Affairs and Fisheries, who were all co-signatories to the BBMP. The BBMP has already stimulated other regional governments to start on similar programs. In the last few months, East Kalimantan was also inaugurated as a founding regional center for the new national university-based Sea Partnership Program sponsored by the MMAF and facilitated by the CRMP.

In **Lampung**, the CRMP focused on establishing a participatory provincial strategic planning and management process. This resulted in the ground-breaking Lampung Coastal Resources Atlas, which defines for the first time the extent and condition of the province's natural resources through a combination of existing information and the input of over 270 local stakeholders and 60 government and non-government organizations. The atlas provided the foundation for the development of a Lampung coastal strategic plan and the program served as a learning site for Bogor Agricultural Institute's Center for Coastal and Marine Resources Studies that has since adopted the management of the Lampung coastal program. As a demonstration of early local actions under the Lampung Province Coastal Strategic Plan, two community-based initiatives - one in Pematang Pasir with an emphasis on sustainable aquaculture good practice, and the other on Sebesi Island in Lampung Bay focused on marine sanctuary development and management - were implemented. The atlas model was later replicated by at least nine other provinces using only provincial government funds.

In **Papua**, in the final year of Proyek Pesisir, a coastal atlas based upon the Lampung atlas format was produced for Bintuni Bay, an environmentally important area that is in the early stages of major development activities. Bintuni Bay is located within the newly formed Bintuni District that is rich in natural resources, including extensive natural gas reserves, and perhaps the largest contiguous stand of mangroves in Southeast Asia. The atlas development process was implemented in cooperation with local NGOs, the petroleum industry (BP) and the University of Papua and began a process of participatory planning and integrated coastal management that is leading to mechanisms of participatory planning for the coastal resources in the area. Local partners have expressed their interest in using the Bintuni Bay atlas as a starting point for developing their own set of "best practices" such as community-based coastal management and multi-stakeholder, watershed-based bay management for Bintuni Bay.

Pengembangan Universitas merupakan aspek penting dari kegiatan Proyek Pesisir dalam mengembangkan pusat keunggulan pengelolaan pesisir melalui sistem Perguruan Tinggi di Indonesia, dan memanfaatkan pusat ini untuk membangun kapasitas universitas-universitas lain di Indonesia. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut (PKSPL) yang dikembangkan di Institut Pertanian Bogor (IPB) telah dipilih sebagai mitra utama, mengingat posisinya sebagai institusi pengelolaan sumberdaya alam utama di Indonesia. Selain mengelola Lampung sebagai daerah kajian, PKSPL-IPB mendirikan perpustakaan sebagai referensi pengelolaan pesisir terpadu nasional, yang terbuka bagi para mahasiswa dan kalangan profesional, serta menyediakan layanan peminjaman perpustakaan antaruniversitas untuk berbagai perguruan tinggi di Indonesia (situs web: <http://www.indomarine.or.id>). PKSPL-IPB telah memprakarsai lokakarya tahunan pembelajaran pengelolaan pesisir terpadu, penerbitan jurnal pesisir nasional, serta bekerja sama dengan Proyek Pesisir mengadakan Konferensi Nasional (KONAS) Pengelolaan Pesisir Terpadu, yang kini menjadi ajang utama bagi pertukaran informasi dan studi kasus pengelolaan pesisir terpadu di Indonesia. Kegiatan dua tahunan tersebut dihadiri 600 peserta domestik dan internasional. Berdasarkan pengalaman positif dengan IPB dan PKSPL tersebut, telah dibentuk sebuah jaringan universitas yang menangani masalah pengelolaan pesisir yaitu INCUNE (Indonesian Coastal Universities Network), yang beranggotakan 11 universitas. Jaringan ini menyatukan universitas-universitas di wilayah pesisir di seluruh Indonesia, yang dibentuk dengan tujuan untuk pertukaran informasi, riset, dan pengembangan kapasitas, dengan PKSPL-IPB berperan sebagai sekretariat. Selain INCUNE, Proyek Pesisir juga memegang peranan penting dalam mengembangkan Program Kemitraan Bahari (PKB) di Indonesia, mengambil contoh keberhasilan Program Kemitraan Bahari (Sea Grant College Program) di Amerika Serikat. Program ini mencoba mengembangkan kegiatan penjangkauan, pendidikan, kebijakan, dan riset terapan wilayah pesisir di berbagai universitas penting di kawasan pesisir Indonesia. Program Kemitraan Bahari menghubungkan universitas di daerah dengan pemerintah setempat melalui isu-isu yang menyentuh kepentingan pemerintah lokal dan masyarakat, serta berupaya mengatasi kesenjangan dalam kapasitas perorangan dan kelembagaan di daerah.

Proyek Pesisir mengembangkan usaha-usaha di tingkat **nasional** untuk memanfaatkan peluang-peluang baru yang muncul, seiring diberlakukannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah. Pada periode 2000-2003, Proyek Pesisir bekerja sama dengan Departemen Kelautan dan Perikanan, BAPPENAS, instansi nasional lainnya, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan perguruan tinggi dalam menyusun rancangan undang-undang pengelolaan wilayah pesisir (RUU PWP). Rancangan undang-undang ini merupakan salah satu rancangan undang-undang yang disusun secara partisipatif dan transparan sepanjang sejarah Indonesia. Saat ini RUU tersebut sedang dipertimbangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RUU disusun berbasis insentif dan bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat lokal dalam memperoleh hak-hak mereka yang berkaitan dengan isu-isu desentralisasi daerah dalam pengelolaan pesisir. Dukungan lain yang diberikan Proyek Pesisir kepada Departemen Kelautan dan Perikanan adalah upaya mengembangkan kapasitas dari para staf, perencanaan strategis, dan dibentuknya program baru yang bersifat desentralistik seperti Program Kemitraan Bahari.

Koleksi dokumen dan bahan bacaan ini bertujuan untuk mendokumentasikan pengalaman-pengalaman Proyek Pesisir dalam mengelola wilayah pesisir, memberikan kesempatan yang lebih luas kepada publik untuk mengaksesnya, serta untuk mentransfer dokumen tersebut kepada seluruh mitra, rekan kerja, dan sahabat-sahabat Proyek Pesisir di Indonesia. Produk utama dari koleksi ini adalah ***Pembelajaran dari Dunia Pengelolaan Pesisir di Indonesia***, yang dibuat dalam bentuk Compact Disc-Read Only Memory (CD-ROM), berisikan gambaran umum mengenai Proyek Pesisir dan produk-produk penting yang dihasilkannya. Adapun Koleksi Proyek Pesisir ini terbagi kedalam 5 tema, yaitu:

- **Seri Reformasi Hukum**, berisikan pengalaman dan panduan Proyek Pesisir tentang proses penyusunan rancangan undang-undang/peraturan kabupaten, provinsi, dan nasional yang berbasis masyarakat, serta kebijakan tentang pengelolaan pesisir dan batas laut
- **Seri Pengelolaan Wilayah Pesisir Regional**, berisikan pengalaman, panduan, dan rujukan Proyek Pesisir mengenai Perencanaan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), profil atlas dan geografis pesisir Lampung, Balikpapan, Sulawesi Utara, dan Papua

University development was an important aspect of the CRMP, and the marine center at Bogor Agricultural Institute, the premier natural resources management institution in Indonesia, was its primary partner, and was used to develop capacity in other universities. In addition to managing the Lampung site, the Center for Coastal and Marine Resources Studies established a national ICM reference library that is open to students and professionals, and provides an inter-university library loan service for other universities in Indonesia (Website: <http://www.indomarine.or.id>). The Center initiated an annual ICM learning workshop, a national peer-reviewed coastal journal and worked with the CRMP to establish a national coastal conference that is now the main venue for exchange of information and case studies on ICM in Indonesia, drawing over 600 Indonesian and international participants to its bi-annual meeting. Building from the positive experience with Bogor and its marine center, an Indonesia-wide network of 11 universities (INCUNE) was developed that tied together key coastal universities across the nation for information exchange, academic research and capacity development, with the Center for Coastal and Marine Resources Studies serving as the secretariat. In addition to INCUNE, the CRMP was instrumental in developing the new Indonesia Sea Partnership Program, modeled after the highly successful U.S. Sea Grant College Program, that seeks to develop coastal outreach, education, policy and applied research activities in key regional coastal universities. This program, sponsored by MMAF, connects regional universities with local governments and other stakeholders through issues that resonate with local government and citizens, and addresses the gap of human and institutional capacity in the regions.

National level efforts expanded to take advantage of new opportunities offered by new laws on regional autonomy. From 2000 to 2003, the CRMP worked closely with the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, the National Development Planning Agency (BAPPENAS), other national agencies, regional government partners, NGOs and universities to develop a new national coastal management law. The National Parliament is now considering this law, developed through one of the most participatory and transparent processes of law development in the history of Indonesia. The draft law is incentive-based and focuses on encouraging local governments, NGOs and citizens to assume their full range of coastal management authority under decentralization on issues of local and more-than-local significance. Other support was provided to the MMAF in developing their own organization and staff, in strategic planning, and in creating new decentralized programs such as the Sea Partnership Program.

The collection of CRMP materials and resources contained herein was produced to document and make accessible to a broader audience the more recent and significant portion of the CRMP's considerable coastal management experience, and especially to facilitate its transfer to our Indonesian counterparts, colleagues and friends. The major product is **Learning From the World of Coastal Management in Indonesia**, a CD-ROM that provides an overview of the CRMP (Proyek Pesisir) and its major products. The collection is organized into five series related to general themes. These are:

- **Coastal Legal Reform Series**, which includes the experience and guidance from the CRMP regarding the development of community-based, district, provincial and national laws and policies on coastal management and on marine boundaries
- **Regional Coastal Management Series**, which includes the experience, guidance and references from the CRMP regarding watershed planning and management, and the geographical and map profiles from Lampung, Balikpapan, North Sulawesi and Papua

- **Seri Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat**, berisikan pengalaman dan panduan Proyek Pesisir dan desa-desa percontohnya di Sulawesi Utara mengenai keberhasilan kegiatan, serta proses pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pesisir
- **Seri Perguruan Tinggi**, berisikan pengalaman, panduan, dan rujukan Proyek Pesisir dan PKSPL-IPB mengenai peranan dan keberhasilan perguruan tinggi dalam pengelolaan pesisir
- **Seri Pemantauan Pesisir**, berisikan pengalaman, panduan, dan rujukan Proyek Pesisir mengenai pemantauan sumberdaya pesisir oleh masyarakat dan pemangku kepentingan, khususnya pengalaman dari Sulawesi Utara

Kelima seri ini berisikan berbagai **Studi Kasus**, **Buku Panduan**, **Contoh-contoh**, dan **Katalog** dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (**CD-ROM**), tergantung isi setiap topik dan pengalaman dari proyek. Material dari seri-seri ini ditampilkan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Sedianya, sebagian besar dokumen akan tersedia baik dalam Bahasa Indonesia maupun Inggris. Namun karena keterbatasan waktu, hingga saat koleksi ini dipublikasikan, belum semua dokumen dapat ditampilkan dalam dua bahasa tersebut. Masing-masing dokumen dalam tiap seri berbeda, tetapi fungsinya saling mendukung satu sama lain, yaitu:

- **Studi Kasus**, mendokumentasikan pengalaman Proyek Pesisir, dibuat secara kronologis pada hampir semua kasus, dilengkapi dengan pembahasan dan komentar mengenai proses dan alasan terjadinya berbagai hal yang dilakukan. Dokumen ini biasanya berisikan rekomendasi-rekomendasi umum dan pembelajaran, dan sebaiknya menjadi dokumen yang dibaca terlebih dahulu pada tiap seri yang disebutkan di atas, agar pembaca memahami topik yang disampaikan.
- **Panduan**, memberikan panduan mengenai proses kegiatan kepada para praktisi yang akan mereplikasi atau mengadopsi kegiatan-kegiatan yang berhasil dikembangkan Proyek Pesisir. Mereka akan merujuk pada **Studi Kasus** dan **Contoh-contoh**, dan sebaiknya dibaca setelah dokumen **Studi Kasus** atau **Contoh-contoh**.
- **Contoh-contoh**, berisikan pencetakan ulang atau sebuah kompilasi dari material-material terpilih yang dihasilkan atau dikumpulkan oleh proyek untuk suatu daerah tematik tertentu. Dalam dokumen ini terdapat pendahuluan ringkas dari setiap contoh-contoh yang ada serta sumber berikut fungsi dan perannya dalam kelima seri yang ada. Dokumen ini terutama digunakan sebagai rujukan bagi para praktisi, serta digunakan bersama-sama dengan dokumen **Studi Kasus** dan **Panduan**, sehingga hendaknya dibaca setelah dokumen lainnya.
- **Katalog**, berisikan daftar atau data yang dihasilkan pada daerah tematik dan telah disertakan ke dalam **CD-ROM**.
- **CD-ROM**, berisikan file elektronik dalam format aslinya, yang berfungsi mendukung dokumen-dokumen lainnya seperti diuraikan di atas. Isi CD-ROM tersebut bervariasi tiap seri, dan ditentukan oleh penyunting masing-masing seri, sesuai kebutuhan.

Beberapa dokumen dari Koleksi Dokumen Proyek Pesisir ini dapat diakses melalui internet di situs Coastal Resources Center (<http://www.crc.uri.edu>), PKSPL-IPB (<http://www.indomarine.or.id>), dan Proyek Pesisir (<http://www.pesisir.or.id>).

Pengantar ini tentunya belum memberikan gambaran detail mengenai seluruh kegiatan, pekerjaan, dan produk-produk yang dihasilkan Proyek Pesisir selama tujuh tahun programnya. Karena itu, kami mempersilakan pembaca untuk dapat lebih memahami seluruh komponen dari koleksi dokumen ini, sembari berharap bahwa koleksi ini dapat bermanfaat bagi para manajer pesisir, praktisi, ilmuwan, LSM, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam meneruskan model-model dan kerangka kerja yang telah dikembangkan oleh Proyek Pesisir dan mitra-mitranya. Kami amat optimis mengenai masa depan pengelolaan pesisir di Indonesia, dan bangga atas kerja sama yang baik yang telah terjalin dengan seluruh pihak selama program ini berlangsung. Kami juga gembira dan bangga atas diterbitkannya Koleksi Dokumen Proyek Pesisir ini.

- **Community-Based Coastal Resource Management Series**, which includes the experience, and guidance from the CRMP and its North Sulawesi villages regarding best practices and the process for engaging communities in coastal stewardship
- **Coastal University Series**, which includes the experience, guidance and references from the CRMP and the Center for Coastal and Marine Resources Studies regarding the role and accomplishments of universities in coastal management
- **Coastal Monitoring Series**, which includes the experience, guidance and references from the CRMP regarding community and stakeholder monitoring of coastal resources, primarily from the North Sulawesi experience

These five series contain various **Case Studies**, **Guidebooks**, **Examples** and **Catalogues** in hard copy and in **CD-ROM** format, depending on the content of the topic and experience of the project. They are reproduced in either the English or Indonesian language. Most of the materials in this set will ultimately be available in both languages but cross-translation on some documents was not complete at the time of publishing this set. The individual components serve different, but complementary, functions:

- **Case Studies** document the CRMP experience, chronologically in most cases, with some discussion and comments on how or why things occurred as they did. They usually contain general recommendations or lessons learned, and should be read first in the series to orient the reader to the topic.
- **Guidebooks** are “How-to” guidance for practitioners who wish to replicate or adapt the best practices developed in the CRMP. They will refer to both the **Case Studies** and the **Examples**, so should be read second or third in the series.
- **Examples** are either exact reprints of key documents, or a compilation of selected materials produced by the project for the thematic area. There is a brief introduction before each example as to its source and role in the series, but they serve primarily as a reference to the practitioner, to be used with the **Case Studies** or **Guidebooks**, and so should be read second or third in the series.
- **Catalogues** include either lists or data produced by the project in the thematic area and have been included on the **CD-ROMs**.
- **CD-ROMs** include the electronic files in their original format that support many of the other documents described above. The content of the CD-ROMs varies from series to series, and was determined by the individual series editors as relevant.

Several of the documents produced in this collection of the CRMP experiences are also available on the Internet at either the Coastal Resources Center website (<http://www.crc.uri.edu>), the Bogor Agricultural Institute website (<http://www.indomarine.or.id>) and the Proyek Pesisir website (<http://www.pesisir.or.id>).

This preface cannot include a detailed description of all activities, work, products and outcomes that were achieved during the seven-year CRMP program and reflected in this collection. We encourage you to become familiar with all the components of the collection, and sincerely hope it proves to be useful to coastal managers, practitioners, scientists, NGOs and others engaged in furthering the best practices and frameworks developed by the USAID/BAPPENAS CRMP and its counterparts. We are optimistic about the future of coastal management in Indonesia, and have been proud to work together during the CRMP, and in the creation of this collection of CRMP (Proyek Pesisir) products.

Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh mitra di Indonesia, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya, yang telah memberikan dukungan, komitmen, semangat, dan kerja keras mereka dalam membantu menyelesaikan Proyek Pesisir dan segenap kegiatannya selama 7 tahun terakhir. Tanpa partisipasi, keberanian untuk mencoba hal yang baru, dan kemauan untuk bekerja bahu-membahu -baik dari pihak pemerintah, LSM, universitas, masyarakat, dunia usaha, para ahli, dan lembaga donor-'keluarga besar' pengelolaan pesisir Indonesia tentu tidak akan mencapai kemajuan pesat seperti yang ada sekarang ini.



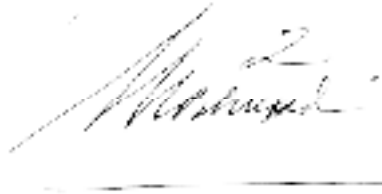
Dr. Anne Patterson
Direktur
Kantor Pengelolaan Sumber Daya Alam
U.S. Agency for International Development/
Indonesia (USAID)



Maurice Knight
Chief of Party
Proyek Pesisir
Coastal Resources Center
University of Rhode Island



Dr. Widi A. Pratikto
Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Departemen Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia



Dr. Dedi M.M. Riyadi
Deputi Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS
Bidang Sumberdaya Alam dan
Lingkungan Hidup

25 Agustus 2003

We would like to acknowledge and extend our deepest appreciation to all of our partners in Indonesia, the USA and other countries who have contributed their support, commitment, passion and effort to the success of CRMP and its activities over the last seven years. Without your participation, courage to try something new, and willingness to work together—government, NGOs, universities, communities, private sector, experts and donors— the Indonesian coastal family could not have grown so much stronger so quickly.




Dr. Anne Patterson
*Director
Office of Natural Resources Management
U.S. Agency for International
Development/ Indonesia*



Maurice Knight
*Chief of Party
Indonesia Coastal Resources
Management Project
Coastal Resources Center
University of Rhode Island*



Dr. Widi A. Pratikto
*Director General for Coasts and
Small Island Affairs
Indonesia Ministry of Marine Affairs
and Fisheries*



Dr. Dedi M.M. Riyadi
*Deputy Minister/Deputy Chairman for
Natural Resources and Environment
Indonesia National Development
Planning Agency*

August 25, 2003

DAFTAR KOLEKSI DOKUMEN PROYEK PESISIR 1997 - 2003 CONTENT OF CRMP COLLECTION 1997 - 2003

Yang tercetak tebal adalah dokumen yang tersedia sesuai bahasanya
Bold print indicates the language of the document

PEMBELAJARAN DARI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI INDONESIA **LEARNING FROM THE WORLD OF COASTAL MANAGEMENT IN INDONESIA**

1. CD-ROM Latar Belakang Informasi dan Produk-produk Andalan Proyek Pesisir
CD-ROM *Background Information and Principle Products of CRMP*
-

SERI REFORMASI HUKUM **COASTAL LEGAL REFORM SERIES**

1. Studi Kasus Penyusunan RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir
Case Study Developing a National Law on Coastal Management
2. Studi Kasus Penyusunan Perda Minahasa Pengelolaan Sumberdaya Wilayah
Case Study Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat
Developing a District Law in Minahasa on Community-Based
Integrated Coastal Management
3. Studi Kasus Batas Wilayah Laut Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka-
Case Study Belitung
The Marine Boundary Between the Provinces of South Sumatera and
Bangka-Bilitung
4. Studi Kasus Konsultasi Publik dalam Penyusunan RUU
Case Study A Public Consultation Strategy for Developing National Laws
5. Panduan Penentuan Batas Wilayah Laut Kewenangan Daerah Menurut
Guidebook Undang-Undang No.22/1999
Establishing Marine Boundaries under Regional Authority Pursuant to
National Law No. 22/1999
6. Contoh Proses Penyusunan Peraturan Perundangan Pengelolaan
Example Sumberdaya Wilayah Pesisir
The Process of Developing Coastal Resource Management Laws
7. Contoh Dokumen-dokumen Pendukung dari Peraturan Perundangan
Example Pengelolaan Wilayah Pesisir
Example from Development of Coastal Management Laws
8. CD-ROM Dokumen-dokumen Pilihan dalam Peraturan Perundangan
CD-ROM Pengelolaan Wilayah Pesisir
Selected Documents from the Development of Coastal Management
Laws
9. CD-ROM Pengesahan Perda Minahasa Pengelolaan Sumberdaya Wilayah
CD-ROM Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat
Enactment of a District Law in Minahasa on Community-Based Inte-
grated Coastal Management

SERI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAERAH
REGIONAL COASTAL MANAGEMENT SERIES

1. Panduan *Guidebook* Penyusunan Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir
Developing A Coastal Resources Atlas
2. Contoh *Example* Program Pengelolaan Wilayah Pesisir di Lampung
Lampung Coastal Management Program
3. Contoh *Example* Rencana Strategis Pengelolaan Terpadu Teluk Balikpapan dan Peta-peta Pilihan
Balikpapan Bay Integrated Management Strategic Plan and Volume of Maps
4. Contoh *Example* Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Pilihan
Selected Compilation of Coastal Resources Atlases
5. CD-ROM *CD-ROM* Rencana Strategis Pengelolaan Terpadu Teluk Balikpapan
Balikpapan Bay Integrated Management Strategic Plan
6. Katalog *Catalogue* Database SIG dari Atlas Lampung (Edisi Terbatas, dengan 2 CD)
Lampung Atlas GIS Database (Limited Edition, with 2 CDs)
7. Katalog *Catalogue* Database SIG dari Atlas Minahasa, Manado dan Bitung (Edisi Terbatas, dengan 2 CD)
Minahasa, Manado and Bintung Atlas GIS Database (with 2 CDs) (Limited Edition, with 2 CDs)
8. Katalog *Catalogue* Database SIG dari Atlas Teluk Bintuni (Edisi Terbatas, dengan 2 CD)
Bintuni Bay Atlas GIS Database (Limited Edition, with 2 CDs)
9. Katalog *Catalogue* Database SIG dari Teluk Balikpapan (Edisi Terbatas, dengan 1CD)
Balikpapan Bay GIS Database (Limited Edition, with 1 CDs)

SERI PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT
COMMUNITY-BASED COASTAL RESOURCES MANAGEMENT SERIES

1. Studi Kasus *Case Study* Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat di Sulawesi Utara
Community Based Coastal Resources Management in North Sulawesi
2. Panduan *Guidebook* Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat
Community Based Coastal Resources Management
3. Panduan *Guidebook* Pembentukan dan Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat
Developing and Managing Community-Based Marine Sanctuaries
4. Panduan *Guidebook* Pembersihan Bintang Laut Berduri
Crown of Thorns Clean-Ups
5. Contoh *Example* Dokumen dari Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat di Sulawesi Utara
Documents from Community-Based Coastal Resources Management in North Sulawesi
6. CD-ROM *CD-ROM* Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat
Community-Based Coastal Resources Management

SERI PERGURUAN TINGGI KELAUTAN COASTAL UNIVERSITY SERIES

1. Studi Kasus Pengembangan Program Kemitraan Bahari di Indonesia
Case Study *Developing the Indonesian Sea Partnership Program*
2. Contoh Pencapaian oleh Proyek Pesisir PKSPL-IPB dan INCUNE (1996-2003)
Example *Proyek Pesisir's Achievements in Bogor Agricultural Institute's Center for Coastal and Marine Resources Studies and the Indonesian Coastal University Network (1996-2003)*
3. Contoh Kurikulum dan Agenda Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu
Example *Curriculum and Agenda from Integrated Coastal Resources Management Training*
4. Katalog Abstrak "Jurnal Pesisir dan Lautan" (1998-2003)
Catalogue *Abstracts from "Pesisir dan Lautan Journal" (1998-2003)*
5. CD-ROM Dokumen Perguruan Tinggi Kelautan
CD ROM *Coastal University Materials*

SERI PEMANTAUAN WILAYAH PESISIR COASTAL MONITORING SERIES

1. Studi Kasus Pengembangan Program Pemantauan Wilayah Pesisir oleh Para Pemangku Kepentingan di Sulawesi Utara
Case Study *Developing a Stakeholder-Operating Coastal Monitoring Program in North Sulawesi*
2. Panduan Pemantauan Terumbu Karang dalam rangka Pengelolaan
Guidebook *Coral Reef Monitoring for Management (from Philippine Guidebook)*
3. Panduan Metode Pemantauan Wilayah Pesisir oleh FORPPELA, jilid 1
Guidebook *FORPPELA Coastal Monitoring Methods, Version 1*
4. Panduan Pemantaun Terumbu Karang Berbasis Masyarakat dengan Metode Manta Tow
Guidebook *Community-Based Monitoring of Coral Reefs using the Manta Tow Method*
5. Contoh Program Pemantauan oleh Para Pemangku Kepentingan di Sulawesi Utara Tahun Pertrama, Hasil-hasil FORPPELA 2002 (dengan 1 CD)
Example *Year One of North Sulawesi's Stakeholder-Operated Monitoring Program, FORPPELA 2002 Results (with 1 CD-ROM)*

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
For more information:

Coastal Resource Center
University of Rhode island
Narragansett, Rhode Island 02882, USA
Phone: 1 401 879 7224
Website: <http://www.crc.uri.edu>

CRMP
Ratu Plaza Building, lt 18
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 9
Jakarta 10270, Indonesia
Phone: (021) 720 9596
Website: <http://www.pesisir.or.id>

Contoh Program Pengelolaan Wilayah Pesisir di Lampung

Dietriech G. Bengen
Budy Wiryawan
Amiruddin Tahir

Contoh Program Pengelolaan Wilayah Pesisir di Lampung

Dietriech G. Bengen
Budy Wiryawan
Amiruddin Tahir

Kutipan : Bengen G.B., B. Wiryawan, A. Tahir, 2003. Contoh Program Pengelolaan Wilayah Pesisir di Lampung, *dalam* Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997-2003, Seri Pengelolaan Wilayah Pesisir Daerah, M. Knight, S. Tighe (editor), Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode Island, USA

Dicetak di Jakarta, Indonesia 2003

Dana untuk persiapan dan pencetakan dokumen ini disediakan oleh USAID bagian dari USAID/BAPPENAS Program Pengelolaan Sumberdaya Alam (NRM) USAID/CRC-URI Proyek Pesisir Jakarta.

Keterangan rinci tentang publikasi Proyek Pesisir bisa diperoleh melalui www.pesisir.or.id
Keterangan rinci tentang publikasi NRM bisa diperoleh melalui www.nrm.or.id
Keterangan rinci tentang publikasi CRC bisa diperoleh melalui www.crc.uri.edu

Editor Bahasa: Kun S. Hidayat, Ahmad Husein
Foto Cover : Tantyo Bangun
Tata letak : Patus Legowo, Anggoro Santoso, Yayak M. Saat

Pengantar

Berbagai materi dalam Seri Pengelolaan Pesisir Daerah ini merupakan kumpulan hasil terpenting yang telah dibuat selama 7 (tujuh) tahun upaya reformasi penatakelolaan pesisir oleh United States Agency for International Development (USAID), bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), dan Direktorat Jenderal Pembangunan daerah (BANGDA), Departemen Dalam Negeri. Dalam kurun waktu tersebut, USAID di Indonesia telah mengalokasikan anggaran untuk Proyek Pengelolaan Sumberdaya Pesisir (Coastal Resources Management Project—CRMP), atau yang lebih dikenal sebagai Proyek Pesisir. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Provinsi Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Papua, serta secara khusus mendukung berbagai kegiatan pemerintah daerah, antara lain di Kota Balikpapan, Kota Manado, Kabupaten Penajam Paser Utara, Paser, Kutai Kertanegara, Minahasa, Bintuni, dan Manokwari.

Misi proyek ini adalah untuk 'Memperkuat Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir yang Terdesentralisasi di Indonesia'. Dalam programnya, Proyek Pesisir berupaya melakukan penegasan peran dan tanggung jawab di antara berbagai mitra regional dan lokal terhadap pengambilan kebijakan dan pengelolaan di bidang sumberdaya alam, meningkatkan kemampuan pihak-pihak terkait tersebut dalam menjalankan tanggung jawab mereka yang berhubungan dengan sumberdaya alam, serta mengembangkan dan memperluas konstituen untuk mendukung pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan di Indonesia. Melalui program kerja sama ini, Proyek Pesisir mendukung pemerintah daerah lewat berbagai cara, yang seluruhnya dilakukan dengan memadukan pembelajaran setiap bagian program, demi untuk menyampaikan berbagai perubahan yang positif dalam penatakelolaan sumberdaya pesisir serta kondisi yang mendukungnya.

Reformasi penatakelolaan pesisir daerah di Indonesia bertambah penting setelah tahun 1999, sejak dikeluarkannya UU No 22/1999 dan 25/1999 yang dengan cepat mendesentralisasikan penatakelolaan pesisir kepada pemerintah tingkat daerah dan lokal. Untuk pertama kalinya, pemerintah daerah secara langsung bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan pesisir mereka, termasuk wilayah laut hingga jarak 4 mil laut untuk kabupaten dan 12 mil laut untuk provinsi. Perubahan-perubahan ini, berikut perubahan di pemerintahan lainnya, telah menegaskan fakta bahwa daerah pesisir secara geografis saling berhubungan dengan yang lain baik melalui laut dan samudera, melalui danau dan sungai-sungai, maupun melalui aliran air yang masuk ke daerah-daerah aliran sungainya (DAS).

Langkah-langkah yang tepat di daerah, utamanya didasarkan pada keefektifan dalam memadukan secara tepat ilmu alam, ilmu sosial, ilmu ekonomi, dan realitas-realitas politik ke dalam konteks budaya penatakelolaan pesisir daerah dan lokal. Hal tersebut selanjutnya membutuhkan keterpaduan aspek-aspek daerah dan lokal tersebut dalam konteks nasional, yakni untuk memastikan bahwa seluruh prioritas-prioritas nasional dapat

terpenuhi. Perangkat berupa peta, sering kali merupakan sarana yang paling tepat untuk menampilkan dan memadukan semua komponen di atas dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Sebagai hasilnya, pada tahun 1998, Proyek Pesisir memulai kegiatan di Provinsi Lampung untuk menyusun atlas sumberdaya pesisir pertama di Indonesia, dalam rangka memadukan berbagai aspek tersebut. Proses penyusunan Atlas Sumberdaya Pesisir Lampung ini menunjukkan bahwa pembentukan kesadaran kolektif dan kemauan berbagi informasi merupakan komponen penting dalam penerapan pengelolaan pesisir terpadu. Atlas tersebut disusun dengan kerja sama antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan melalui sebuah proses yang partisipatif. Atlas tersebut menjadi sebuah model yang kemudian dicontoh oleh lebih 9 provinsi lain, yang menyusunnya dengan anggaran mereka sendiri. Di Lampung, atlas tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pesisir Lampung. Berdasarkan Renstra tersebut, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten telah berkomitmen dan mengalokasikan anggaran dengan jumlah yang signifikan bagi berbagai kegiatan pengelolaan pesisir.

Proyek Pesisir kemudian bekerja sama dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di Kabupaten Minahasa, Kota Manado, dan Bitung (Sulawesi Utara) serta Teluk Bintuni (Papua) dalam menyusun sebuah atlas pesisir, berdasarkan model yang telah dilakukan di Lampung. Masing-masing tempat tersebut merupakan wilayah yang direncanakan menjadi kawasan pengembangan ekonomi yang besar dengan mengandalkan kekayaan sumberdaya alam daerah tersebut. Penyusunan atlas di Sulawesi Utara dan Papua sama-sama dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Adapun maksud dan tujuan pembuatan atlas, berikut sumberdaya yang digunakan dalam prosesnya, masing-masing daerah memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan.

Dalam rangka saling berbagi pengalaman dan pembelajaran, Seri Pengelolaan Pesisir Daerah ini menampilkan Buku Panduan penyusunan atlas pesisir dan Buku Contoh kompilasi berbagai peta-peta pilihan dari atlas yang ada dan sumber lainnya. Juga, sebuah buku contoh berisi berbagai materi program pengelolaan pesisir yang dilaksanakan di Lampung, dengan fokus pelaksanaan kegiatan awal dalam rencana strategis pengelolaan pesisir Lampung. Kegiatan itu antara lain berupa pembentukan dan pengelolaan daerah perlindungan laut berbasis masyarakat (DPL-BM) di Pulau Sebesi.

Atlas-atlas yang disusun ini, serta atlas lain dibuat oleh beberapa pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia, menjadi titik awal diskusi mengenai sumberdaya pesisir, hubungannya dengan perencanaan tata ruang, dan cara pengelolaannya secara kooperatif antara pemerintah daerah, masyarakat umum, dan swasta.

Seperti disebutkan di atas, sumberdaya pesisir sangat dipengaruhi oleh berbagai aktivitas hingga mencakup kawasan DAS-nya. Pada tahun 1999, Proyek Pesisir memprakarsai sebuah program dalam rangka memperkenalkan pengelolaan dan perencanaan pesisir berbasis DAS bagi Teluk Balikpapan di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur merupakan provinsi terkaya di Indonesia, dan Teluk Balikpapan merupakan pintu gerbang perdagangan dan industri. Potensi ekonomi masa depan Provinsi Kalimantan Timur dikhawatirkan menurun akibat dampak-dampak negatif kegiatan tersebut terhadap teluk. Kegiatan itu juga akan berdampak, baik untuk jangka pendek maupun panjang, terhadap mata pencaharian dan kualitas hidup masyarakat pesisir setempat.

Prakarsa Proyek Pesisir membuahkan hasil pada 2002 berupa Rencana Pengelolaan Strategis Terpadu Teluk Balikpapan, yang telah disepakati dan diteken bersama oleh Walikota Balikpapan, Bupati Penajam Paser Utara, Paser, dan Kutai Kartanegara, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, serta Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Dokumen ini

merupakan rencana lintas-yurisdiksi pertama kalinya di Indonesia, dan menjadi model yang telah mulai ditiru oleh pemerintah daerah lainnya. Dokumen Rencana Strategis Pengelolaan Terpadu Teluk Balikpapan tersebut disertakan dalam seri ini. Bersama dokumen contoh tersebut, disertakan pula beberapa peta berwarna pilihan yang berasal dari data Sistem Informasi Geografis (SIG) tentang Teluk Balikpapan, dan sebuah CD berisi rencana dan referensi dari berbagai kegiatan dan kajian dalam mempersiapkan sebuah perencanaan pengelolaan serta sebagai panduan bagi para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan.

Proyek Pesisir telah menyusun dan menyediakan sebuah database sistem informasi geografis (SIG) luas dari Teluk Balikpapan tersebut dan ketiga wilayah tempat atlas dikerjakan bagi seluruh pemangku kepentingan yang membutuhkannya. Agar keempat database SIG tersebut menjadi sebuah sumber informasi yang transparan, hidup, dan terbuka, Proyek Pesisir telah membuat Katalog lembaran data SIG dengan tabel-tabel metadata yang mendokumentasikan sumber dan parameter-parameter penting lainnya dari data tematik tiap wilayah (Lampung, Sulawesi Utara, Teluk Bintuni, dan Teluk Balikpapan). Tiap katalog terdapat dalam CD-ROM terpisah, berisi file-file gambar dan tabel-tabel metadata, serta file gambar (format jpeg) untuk peta-peta yang dihasilkan oleh Proyek Pesisir. Untuk ketiga wilayah tempat atlas dibuat (Lampung, Sulawesi Utara, Papua), terdapat CD-ROM kedua, berisikan program interaktif yang mudah dioperasikan, yang memungkinkan pengguna SIG memodifikasi beberapa data pada peta-peta atlas tersebut. Katalog tersebut diharapkan dapat menjadi sebuah referensi bagi para teknisi SIG dan para pengelola pesisir yang bermaksud memanfaatkan database SIG ini untuk pekerjaan selanjutnya di masa depan.

Seri Pengelolaan Pesisir Daerah ini menggambarkan betapa lebar dan dalamnya upaya-upaya yang dilakukan oleh Proyek Pesisir dalam perencanaan daerah. Sebagian besar dokumen yang ada disajikan dalam bahasa Indonesia, meskipun terdapat rencana untuk menerjemahkan bagian-bagian tertentu yang mungkin relevan untuk kalangan yang lebih luas di tingkat internasional.

Dokumen-dokumen dalam seri ini hendaknya dibaca bertalian satu dengan lainnya. Masing-masing dokumen juga saling mengacu antara satu dengan lainnya. Dalam konteks yang lebih luas, dokumen ini juga sebaiknya ditinjau dengan isu lainnya dalam 4 (empat) koleksi Dokumen Proyek Pesisir lainnya yang sama-sama diterbitkan. Dokumen-dokumen dan CD yang tersedia dalam seri ini mencakup:

1. **Panduan:** Penyusunan Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir
2. **Contoh:** Program Pengelolaan Wilayah Pesisir di Lampung
3. **Contoh:** Rencana Strategis Pengelolaan Teluk Balikpapan dan Peta-Peta Pilihan
4. **Contoh:** Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Pilihan
5. **CD-ROM:** Rencana Strategis Pengelolaan Terpadu Teluk Balikpapan
6. **Katalog:** Database SIG dari Atlas Lampung (plus 2 CD) Edisi Terbatas
7. **Katalog:** Database SIG dari Atlas Minahasa, Manado dan Bintung (plus 2 CD) Edisi Terbatas
8. **Katalog:** Database SIG dari Atlas Teluk Bintuni (plus 2 CD) Edisi Terbatas
9. **Katalog:** Database SIG dari Teluk Balikpapan (plus 1 CD) Edisi Terbatas

Kami berharap agar materi dan contoh-contoh yang ada dalam seri ini memberikan manfaat dalam pekerjaan dan kegiatan para pembaca, baik sebagai praktisi, pegawai pemerintah, anggota organisasi non pemerintah (Ornop), maupun anggota masyarakat pesisir. Dokumen-dokumen ini sebaiknya dibaca bertalian dengan yang lain, dan dapat

direferensi silang antara satu dengan yang lain. Bahan-bahan dalam seri ini bukan saja ditampilkan sebagai contoh model yang sukses dalam pengelolaan pesisir yang terdesentralisasi di Indonesia, tetapi juga sebagai model yang dapat digunakan dalam pengelolaan sumberdaya alam lainnya di Indonesia dan negara-negara lain. Isu-isu yang didiskusikan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya-upaya ini berlaku untuk berbagai konteks. Karena itu, ditampilkannya dokumen-dokumen tersebut dalam seri diharapkan dapat memaksimalkan nilainya, khususnya dalam konteks di Indonesia.

•••

Buku “Panduan Penyusunan Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir” ini diterbitkan bukan saja atas dasar pengalaman praktis dari Proyek Pesisir saja, melainkan juga menggabungkan antara beberapa pengalaman pembuatan atlas sumberdaya wilayah pesisir di Indonesia. Pada saat buku ini dibuat, telah terdapat 8 (delapan) atlas serupa untuk daerah-daerah di seluruh Indonesia. Dan hingga panduan ini diterbitkan, tercatat lebih dari 13 Atlas serupa telah diterbitkan untuk beberapa daerah lain di Indonesia. Daerah-daerah tersebut yaitu Bali, Teluk Kendari, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat bagian utara dan selatan, Indragiri Hilir, Riau daratan, Riau kepulauan, Papua bagian utara, Kecamatan Pulau Derawan-Kalimantan Timur, Lampung, Sulawesi Utara, dan Teluk Bintuni-Papua.

Berdasarkan pengalaman dari delapan atlas yang dianalisis tersebut -beberapa di antaranya dilakukan langsung oleh Proyek Pesisir di lapangan, maka disusunlah buku panduan ini, yang ditujukan terutama bagi para desainer, manajer program, dan para perencana yang terkait dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan penataan ruang.

Mengapa atlas diperlukan? Jika kita melakukannya dengan proses yang terbaik, maka beberapa manfaat utama dapat dipetik dari atlas ini, yaitu:

1. Terciptanya sebuah konsensus data yang ingin ditampilkan untuk mewakili wilayah pesisir suatu daerah.
2. Menyatukan setiap pemangku kepentingan (stakeholders) ke dalam satu meja bersama dan membahas bersama setiap isu potensi dan masalah yang dimiliki daerah.
3. Interpretasi isu, potensi dan masalah dalam perpektif yang berbeda dari berbagai sudut pandang dapat dituangkan secara lebih obyektif.
4. Menjadi alat dan bahan yang tepat untuk perencanaan wilayah dan langkah yang lebih terarah pada perencanaan strategis.

Indonesia telah begitu banyak menghabiskan daya, tenaga, usaha dan investasi sistem informasi geografis bagi setiap daerahnya. Hal ini terbukti dengan masuknya beberapa program besar seperti LREP, MREP, ataupun yang bersumber dari donatur-donatur asing seperti Kanada, Amerika, dan Jepang. Namun pada akhirnya, sumberdaya teknologi dan manusianya sering tak lagi mampu berkembang, seiring dengan berakhirnya proyek tersebut. Karena itu, sudah saatnya kini setiap pimpinan kebijakan bersama-sama menerima hal tersebut bukan lagi dalam kaca mata pandang “proyek”, melainkan sebagai konsensus yang kuat untuk melanjutkannya sendiri, dengan kekuatan sendiri, dan mengupayakannya menjadi sebuah sistem informasi data yang berkelanjutan. Dengan demikian, ada ataupun tidak bantuan dari pihak luar, daerah tetap bisa melakukan pembaharuan data dan informasi, serta tidak lagi tergantung pada pihak luar.

Dalam setiap bab di buku panduan ini, kita akan menemukan masukan terbaik yang dapat dilakukan di daerah, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut. Masukan-masukan ini kemudian diikuti dengan contoh-contoh kongkrit yang telah

dilakukan, baik oleh Proyek Pesisir maupun universitas dan pemerintah daerah. Pada Bab 1, diberikan penjelasan awal mengenai sebuah produk atlas, manfaat, dan kaitannya dengan pengelolaan pesisir terpadu (integrated coastal management). Kemudian pada Bab 2 dan 3, diuraikan lebih banyak mengenai proses sebuah atlas sumberdaya wilayah pesisir dibuat, termasuk di dalamnya perencanaan setiap langkah, sosialisasi, pembentukan tim, pencarian dan kompilasi data, hingga verifikasi data, produksi, dan rekomendasi. Panduan ini ditutup dengan panduan penyusunan katalog sistem informasi geografis (SIG). Materi ini merupakan masukan penting untuk membuat atlas dan katalog menjadi sebuah produk yang bermanfaat dan data yang tersedia dapat terus terbaharui.

Akhirnya, buku panduan ini bukanlah merupakan produk akhir, melainkan akan menjadi salah satu pintu masuk yang berharga untuk memulai penataan ruang wilayah pesisir yang memiliki konsensus bersama yang tinggi. Yang terpenting bukanlah atlasnya, melainkan terbangunnya sebuah sistem yang terhubung satu sama lain, serta mengandung informasi yang tepat dan terkini untuk setiap penggunaannya. Semua ini sangat tergantung dari partisipasi seluruh pihak di daerah untuk mewujudkannya menjadi informasi yang berguna, dan disepakati.

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada semua pihak, antara lain kepada United States Agency for International Development (USAID), BAPPENAS, Coastal Resources Center University of Rhode Island (CRC-URI), dan Departemen Kelautan dan Perikanan R.I. Terima kasih kami sampaikan pula terutama kepada rekan-rekan mitra kerja di Lampung, Sulawesi Utara, dan Papua, serta pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini, atas segala kerja sama, dukungan, bantuan dalam proses panjang sebuah perjalanan pembelajaran di bidang sumber daya pesisir serta ruang di dalamnya.

Selamat membaca dan melakukan implementasi terbaik bagi daerah anda dan negara ini.

Jakarta, Agustus 2003

Monique Sumampouw
Budy Wiryawan
Asep Sukmara
Frans Terok
Celly Catharina
Stacey A. Tighe

Pendahuluan

Dalam mengemban misinya untuk membantu pemerintah Indonesia dalam melakukan proses desentralisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, Proyek Pesisir menggunakan pendekatan dua arah (two-track approach). Dalam arti, dari bawah (tingkat desa, kabupaten dan provinsi) mengembangkan proyek percontohan (working models) tentang penerapan pengelolaan pesisir secara terpadu, yaitu di Provinsi Sulawesi Utara, Lampung dan Kalimantan Timur. Sementara itu, pada tingkat nasional dilakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran nasional tentang pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu melalui kegiatan seminar, konperensi, advokasi dan publikasi (Dutton, 2000).

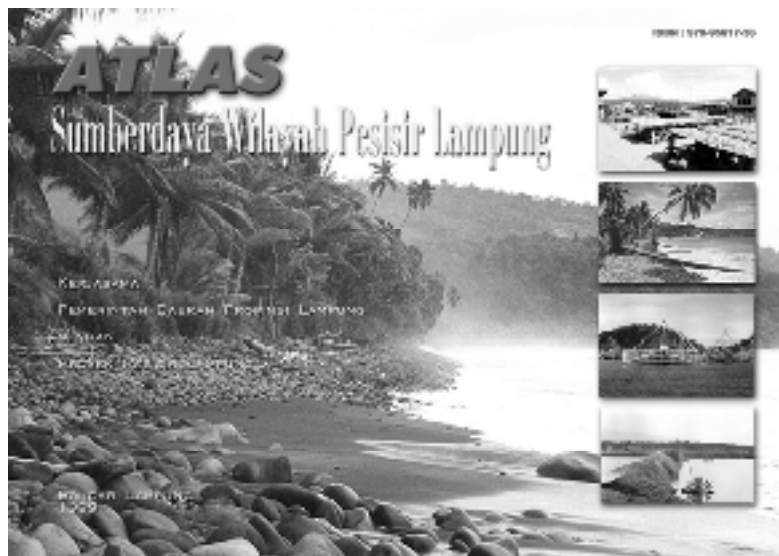
Untuk studi kasus perencanaan pengelolaan sumberdaya pesisir di Provinsi Lampung (1998-2002), terdapat tiga output yang dapat diangkat sebagai suatu pembelajaran, yaitu (1) Penyusunan Atlas Sumberdaya Pesisir Lampung, (2) Penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Pesisir Lampung, dan (3) Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat. Secara konseptual, pengembangan pengelolaan pesisir di Provinsi Lampung mengikuti suatu siklus yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu Identifikasi Isu Pengelolaan, Perencanaan Program, Adopsi Program dan Penadanaan, Implementasi dan Monitoring dan Evaluasi.

2

Penyusunan ATLAS Sumberdaya Pesisir

Atlas Sumberdaya Pesisir Lampung sebagai kumpulan data dan informasi tentang potensi dan permasalahan pengelolaan pesisir di Lampung merupakan basis bagi penyusunan rencana pengelolaan lebih lanjut. Sebagai basis perencanaan pengelolaan, penyusunan atlas ini menekankan pada dua hal penting, yaitu kelengkapan data dan informasi yang akurat dan penerimaan serta pengakuan *stakeholders* terhadap keberadaan Atlas Sumberdaya Pesisir. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan melibatkan berbagai pihak yang mampu memenuhi dua tuntutan tersebut.

Untuk mendapatkan data dan informasi akurat, pengumpulan data dilakukan dari level desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Dalam proses pengumpulan data, selain pendekatan partisipatif, pendekatan ilmiah juga dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur perguruan tinggi dan lembaga penelitian seperti Institut Pertanian Bogor dan Universitas Lampung.



Data tersebut dianalisis oleh tim teknis yang beranggotakan berbagai unsur dari perguruan tinggi, pemerintah dan LSM. Hasil analisis selanjutnya diverifikasi kembali pada setiap tingkatan untuk mengetahui bahwa data tersebut benar-benar sudah absah.

Partisipasi *stakeholders*

Proses penyusunan Atlas Sumberdaya Pesisir harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen *stakeholders* pesisir di Provinsi Lampung, yaitu unsur pemerintah, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian serta media massa. Dari unsur pemerintah, selain Bappeda juga harus melibatkan seluruh lembaga-lembaga terkait lainnya, seperti Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan Laut, Dinas

Pendidikan Nasional, Dinas Kesehatan, Bapedalda, Dinas Pertambangan, Dinas Pariwisata, Dinas PU Pengairan dan sebagainya. Dari unsur masyarakat diikuti baik oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, ketua-ketua kelompok dalam masyarakat, maupun anggota masyarakat umum.

Secara formal jumlah orang yang terlibat dalam penyusunan Atlas Sumberdaya Pesisir Lampung adalah 176 orang yang terdiri dari 26 orang tim teknis, 50 orang *volunteer*, 10 orang staf Pemda Lampung, 30 orang LSM dan Swasta, 20 orang media massa, dan 40 orang CRC-URI, perguruan tinggi, Ditjen Bangda. Disamping itu pembuatan atlas ini juga melibatkan 16 perusahaan swasta dan 6 LSM lokal. Jumlah total peta tematik terdapat 13 peta, di antaranya peta terumbu karang, mangrove, perikanan tangkap dan lain sebagainya. (*lihat buku: Atlas Guide Book Bab VI*).

Pembelajaran

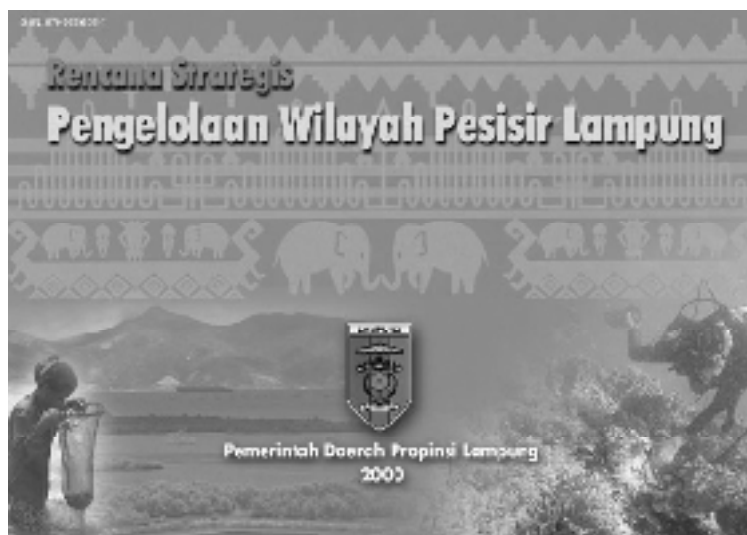
Dalam proses adopsi oleh pihak lain (pemerintah daerah), perhatian khusus perlu diberikan terutama pada proses pengumpulan data dan informasi, baik data primer maupun sekunder, proses verifikasi dan klarifikasi dari instansi pemerintah yang menerbitkan data tersebut, serta format penyajian. Proses-proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dan melibatkan beragam pihak, sehingga memerlukan kesabaran untuk mencapai konsensus tentang informasi yang disajikan dalam Atlas. Jika proses ini dilakukan secara seksama, niscaya atlas yang disusun ini mempunyai kualitas yang memadai untuk dijadikan dasar bagi perencanaan wilayah pesisir secara terpadu.

Sebagai suatu produk atlas pesisir yang pertama, Atlas Sumberdaya Pesisir Lampung menjadi model bagi beberapa daerah untuk menyusun Atlas Sumberdaya Pesisir. Beberapa daerah yang telah mengadopsi atlas tersebut adalah Provinsi Jawa Barat, Bali, Riau, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat. (*Lihat paper Membangun Kemitraan untuk Rencana Strategis Pembangunan Wilayah Pesisir melalui Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir - Studi Kasus 7 Provinsi di Indonesia: Monique Sumampouw & Budy Wiryawan*).

3

Penyusunan Rencana Strategis

Sebagai produk perencanaan, Rencana Strategis (Renstra) Pengelolaan Pesisir Lampung memiliki peran yang sangat penting bagi terwujudnya pengelolaan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan Provinsi Lampung, kedudukan Renstra Pesisir adalah (1) memberikan arahan formulasi, pengendalian dalam penyusunan prioritas program, (2) mengarahkan dan memprioritaskan pengelolaan di suatu wilayah pesisir, dan (3) memberikan sumbangan dalam perumusan sasaran pembangunan. Untuk mampu mengarahkan pengelolaan wilayah pesisir secara menyeluruh (komprehensif), Renstra disusun berdasarkan isu-isu pengelolaan yang muncul di wilayah pesisir Lampung, baik dari aspek biofisik, sosial ekonomi dan budaya serta kelembagaan.



Partisipasi Stakeholder

Proses penyusunan Renstra Pesisir Lampung dilakukan dengan sangat partisipatif yang melibatkan seluruh komponen *stakeholders* pesisir di Provinsi Lampung, yaitu unsur pemerintah, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian serta media massa. Dari unsur pemerintah, selain Bappeda juga melibatkan seluruh lembaga-lembaga terkait lainnya, seperti Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan Laut, Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Kesehatan, Bapedalda, Dinas Pertambangan, Dinas Pariwisata, Dinas PU Pengairan dan sebagainya. Dari unsur masyarakat diikuti baik oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, ketua-ketua kelompok dalam masyarakat, maupun anggota masyarakat umum. Dari unsur perguruan tinggi dan lembaga penelitian diikuti oleh Universitas Lampung, Balai Budidaya Laut dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-IPB. Lembaga Swadaya Masyarakat diwakili LSM Watala dan LSM Mitra Bentala, sedangkan dari unsur swasta diwakili oleh Gappindo, PHRI, ASITA, APPU, dan sebagainya.

Meskipun secara umum seluruh *stakeholders* berperan aktif dan terlibat hampir dalam setiap tahapan dan aktivitas yang dilakukan, namun pada dasarnya masing-masing unsur

stakeholders memiliki peran yang spesifik dalam penyusunan Renstra Pesisir ini. Peran spesifik ini tergantung pada tugas dan fungsi dari masing-masing unsur. Adapun peran spesifik tersebut, misalnya (1) masyarakat umum berperan dalam memberikan berbagai informasi yang lebih lengkap dan aspirasi-aspirasi mereka yang dapat dijadikan masukan bagi penyusunan rencana strategis; (2) pemerintah berperan sebagai penggagas kebijakan dan strategi pengelolaan; (3) Lembaga Swadaya Masyarakat memberikan informasi tambahan yang pada umumnya belum dapat diberikan oleh masyarakat, misalnya berbagai kendala yang dihadapi dalam masyarakat; (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berperan sebagai penguat bagi keabsahan Renstra Pesisir; (5) swasta berperan sebagai pendukung dalam penyediaan informasi terutama yang terkait dengan mereka; dan (6) Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian berperan dalam memberikan arahan-arahan dalam penyusunan Renstra Pesisir.

Pelibatan segenap unsur *stakeholders* di atas, selain menghasilkan Renstra Pesisir yang partisipatif, juga memberikan berbagai manfaat lainnya. Manfaat dari keterlibatan *stakeholders* tersebut adalah (1) meningkatkan rasa kepemilikan diantara setiap unsur *stakeholders* terhadap Renstra Pesisir; (2) terciptanya kesepakatan-kesepakatan atau kompromi diantara *stakeholders*; (3) meminimalisasi kemungkinan konflik atau hambatan yang dihadapi pada saat implementasi Renstra Pesisir; (4) dengan keterlibatan seluruh segenap unsur *stakeholders* sejak awal sudah merupakan sosialisasi awal dari Renstra Pesisir

Pembelajaran

- Agar mampu mengakomodir aspirasi-aspirasi dan keinginan masyarakat, maka hal-hal yang perlu dilakukan dalam penyusunan Renstra Pesisir adalah (1) kumpulkan berbagai aspirasi-aspirasi masyarakat terhadap pengelolaan wilayah pesisir; (2) lakukan diskusi secara intensif dan secara berkala dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi tersebut; (3) libatkan LSM-LSM dalam menggali aspirasi masyarakat; (4) kombinasikan aspirasi masyarakat dengan tujuan pembangunan lainnya (aspirasi dari komponen *stakeholders* lainnya).
- Untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif tersebut beberapa hal yang dapat dilakukan adalah (1) identifikasi dan libatkan *stakeholders* kunci dan berpengaruh dalam masyarakat; (2) posisikan setiap unsur *stakeholders* pada level yang sama (tidak ada yang merasa lebih penting); (3) sedapat mungkin laksanakan setiap kegiatan yang dapat mengikutsertakan *stakeholders* seluas mungkin.
- Untuk mendapatkan kontribusi optimal tersebut, maka dalam penyusunan suatu Renstra perlu melakukan hal-hal sebagai berikut (1) identifikasi peran-peran spesifik dari masing-masing komponen *stakeholders*; (2) berikan tanggungjawab yang lebih besar kepada setiap komponen *stakeholders* berdasarkan peran spesifik tersebut; dan (3) hindari hal-hal yang dapat mengurangi kontribusi setiap komponen *stakeholders* (misalnya jangan berikan peran yang tidak disenangi).

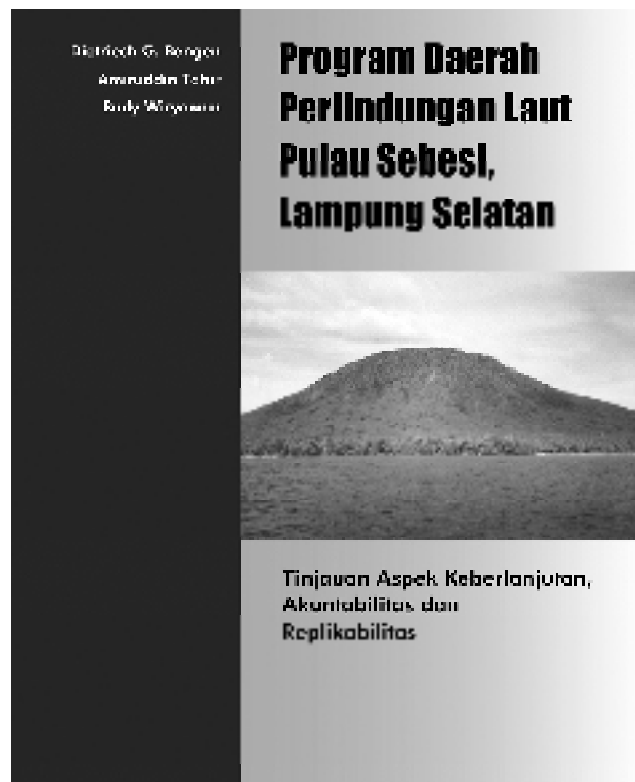
4

Pengelolaan Pesisir Berbasis Masyarakat

Salah satu implementasi pengelolaan pesisir berbasis masyarakat yang dilakukan di Provinsi Lampung adalah pengembangan Daerah Perlindungan Laut (DPL) di Pulau Sebesi, Kabupaten Lampung Selatan merupakan upaya masyarakat Pulau Sebesi untuk mempertahankan dan memperbaiki kualitas sumberdaya dan ekosistem terumbu karang, serta sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumberdaya lainnya yang berasosiasi dengan terumbu karang. Tujuan dari daerah perlindungan laut adalah (1) memelihara fungsi ekologis dengan melindungi habitat tempat hidup, bertelur, dan memijah biota-biota laut, dan (2) memelihara fungsi ekonomis kawasan pesisir bagi masyarakat Pulau Sebesi dan sekitarnya, sehingga terjadi keberlanjutan dan produksi perikanan yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan baik dari hasil produksi perikanan maupun dari sektor pariwisata bahari.

Pengembangan Kapasitas Masyarakat

Untuk mempersiapkan sumberdaya manusia yang akan melanjutkan program ini, dilaksanakan program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, pendampingan dan penyediaan bantuan teknis. Program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang telah dilaksanakan adalah (1) pengiriman anggota masyarakat ke Sulawesi Utara untuk studi banding tentang Pengelolaan Terumbu Karang di Desa Blongko, Talise, dan Taman Nasional Bunaken; (2) pelatihan pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat untuk penyiapan kader di Desa Tejang Sebesi dan Pematang Pasir; (3) pelatihan pengolahan hasil perikanan tradisional; dan (4) pelatihan monitoring (manta tow). Program-program di atas, secara langsung atau tidak langsung telah meningkatkan kapasitas sumberdaya



manusia di Pulau Sebesi, terutama dalam hal (a) terbentuknya Badan Pengelola daerah perlindungan laut; (b) kemampuan masyarakat membuat at uran pengelolaan daerah perlindungan laut; dan (c) kemampuan memahami permasalahan pengelolaan terumbu karang (monitoring terumbu karang).

Program lain yang dilakukan adalah program pendampingan masyarakat yang akan membantu masyarakat setempat dalam mempersiapkan upaya-upaya pengelolaan sumberdaya pesisir, yaitu (1) penempatan *Extension Officer* (penyuluh lapangan dari luar Pulau Sebesi) satu orang mulai dari awal sampai akhir; dan (2) pengangkatan asisten penyuluh lapangan dari masyarakat setempat (dua orang). Penyuluh lapangan berfungsi sebagai jembatan antara manajemen proyek dan masyarakat desa. Tugas penyuluh lapangan adalah (a) fasilitator dan mediator antara proyek pesisir, pemerintah dan masyarakat; (b) membantu proses pelaksanaan proyek dengan bantuan asisten dan tanggungjawab terhadap proyek; dan (c) membangun motivasi masyarakat desa dalam upaya pengelolaan pesisir.

Selain program pendampingan, peningkatan kapasitas SDM juga dilakukan melalui penyediaan bantuan teknis. Bantuan teknis yang telah dilakukan adalah (a) tenaga asistensi monitoring terumbu karang (Mahasiswa IPB); (b) pelatihan pengolahan ikan dan (c) pelatihan tentang organisasi. Pelatihan monitoring terumbu karang dimaksudkan untuk memberikan keterampilan kepada masyarakat dan pengelola daerah perlindungan laut bagaimana melakukan monitoring terumbu karang. Pelatihan organisasi dilaksanakan oleh Yayasan Mitra Bentala yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang berorganisasi dan pemahaman tentang posisi kekuatan dari suatu organisasi. Sedangkan pelatihan pengolahan ikan dilaksanakan oleh jurusan Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan khususnya ibu-ibu bagaimana mengolah ikan dengan mutu yang baik.

Partisipasi Masyarakat

Ketika inisiator program menetapkan Pulau Sebesi sebagai lokasi implementasi program pengelolaan pesisir berbasis masyarakat, salah satu kriteria yang digunakan dalam pemilihan lokasi adalah adanya keinginan dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir berkelanjutan. Alasannya adalah apabila kriteria ini dipenuhi maka diharapkan program-program perlindungan sumberdaya laut akan mudah diterima oleh masyarakat dan tentunya keterlibatan mereka dalam program tersebut tinggi. Dalam konteks keterlibatan masyarakat dalam suatu program pengelolaan pesisir, terdapat tiga tingkatan partisipasi, yaitu partisipasi sebatas pada memberi informasi (tingkat informasi), partisipasi sebatas target konsultasi, dan partisipasi sebagai pemilik program.

Dalam pengembangan daerah perlindungan laut Pulau Sebesi, partisipasi tingkat informasi terjadi pada saat inisiator program akan memilih satu pulau dari beberapa pulau untuk dijadikan lokasi implementasi program. Partisipasi tingkat konsultasi terjadi pada saat inisiator baru memulai menempatkan penyuluh lapangan di Pulau Sebesi. Sedangkan partisipasi tingkat pemilik terjadi pada saat inisiator sudah membentuk Kelompok Badan Pengelola. Setelah berjalan sekitar setahun, inisiator program telah membentuk Badan Pengelola daerah perlindungan laut yang beranggotakan 22 orang yang berasal dari masyarakat Pulau Sebesi.

Semenjak dibentuk, Badan Pengelola inilah yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi. Inisiator program melalui

staf penyuluh lapangan hanya menjadi pendamping dalam meningkatkan kemampuan dari setiap anggota Badan Pengelola. Dengan demikian, tingkat partisipasi dari *stakeholders* dalam program daerah perlindungan laut ini adalah sebagai pemilik dan diharapkan mampu menjalin kerjasama antar lembaga yang ada di Pulau Sebesi sehingga tercipta sistem pengelolaan yang terpadu di antara komponen *stakeholders*.

Keberlanjutan DPL Berbasis Masyarakat

Untuk menjaga agar program daerah perlindungan laut ini benar-benar terus berlanjut, sehingga tujuan dari perlindungan sumberdaya alam pesisir Pulau Sebesi dapat dicapai, terdapat tiga strategi yang perlu dijalankan. Ketiga strategi tersebut adalah:

- *Pertama:* Mengembangkan mata pencaharian alternatif sebagai kompensasi dari tidak dimanfaatkannya sumberdaya pesisir yang terdapat di kawasan daerah perlindungan laut. Mata pencaharian alternatif yang disarankan adalah pengembangan keramba terutama keramba dasar, pengembangan rumpon dan pengembangan pengolahan hasil-hasil laut.
- *Kedua:* Internalisasi program daerah perlindungan laut ke dalam program tahunan pemerintah daerah, sehingga pengelolaan daerah perlindungan laut senantiasa mendapatkan bantuan dan pembinaan dari pemerintah daerah.
- *Ketiga:* adalah adanya program pendampingan lanjutan oleh lembaga donor lain sebagaimana yang dilaksanakan oleh Proyek Pesisir selama ini.

Lampiran

Program Daerah Perlindungan Laut Pulau Sebesi, Lampung Selatan

(Tinjauan Aspek Keberlanjutan, Akuntabilitas dan Replikabilitas)

1

Pendahuluan

Latar Belakang

Ketika Program *Coastal Resources Management Project* (CRMP) atau lebih populer disebut Proyek Pesisir dirancang dan mulai dilaksanakan 6 tahun yang lalu (1996), salah satu harapan dari perancang dan pelaksana program ini adalah diadopsinya program ini oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, program yang telah berlangsung lama dengan pendanaan yang tidak sedikit, tidak berakhir seiring dengan berhentinya bantuan pendanaan dari donor. Harapan ini sangat beralasan, karena bila disimak betapa banyak program-program sejenis yang telah dilaksanakan di Indonesia, namun sebagian besar dari program tersebut berakhir seiring dengan berhentinya bantuan dari donor. Padahal bila ditinjau dari segi lingkup kegiatan, program-program pengelolaan pesisir di Indonesia selama ini sudah cukup luas. Menurut Dahuri (1999), lingkup program pengelolaan pesisir Indonesia yang ada saat ini sebanyak 9 aspek, yaitu : (1) penataan dan pengembangan sistem pengelolaan ekosistem pesisir dan lautan; (2) penguatan kelembagaan pendidikan, penelitian dan pengelolaan; (3) rehabilitasi, pelestarian dan konservasi lingkungan pesisir dan lautan; (4) pengembangan data dasar dan sistem informasi; (5) pengembangan dan peningkatan partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan pesisir; (6) pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir; (7) pemberdayaan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan pesisir dan lautan; (8) pengembangan perdagangan jenis komoditas pesisir dan lautan yang sesuai dengan kaedah perlindungan lingkungan; dan (9) pengembangan mata pencaharian alternatif bagi penduduk di kawasan pesisir.

Lalu apa sebenarnya yang membuat suatu program tidak berjalan ketika program tersebut sudah tidak mendapatkan bantuan dari pemberi dana lagi? Satu jawaban yang 'mungkin' benar adalah karena program tersebut belum diadopsi secara formal oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks tersebut, Proyek Pesisir yang bertujuan untuk membantu pemerintah Indonesia dalam melakukan proses desentralisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan menggunakan pendekatan dua arah (*two-track approach*). Dalam arti, dari bawah (tingkat desa, kabupaten dan provinsi) mengembangkan working models (proyek percontohan) tentang penerapan pengelolaan pesisir secara terpadu, yaitu di Provinsi Sulawesi Utara, Lampung dan Kalimantan Timur. Sementara itu, pada tingkat nasional dilakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran nasional tentang pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (Dutton, 2000).

Salah satu proyek percontohan yang dikembangkan oleh Proyek Pesisir adalah daerah perlindungan laut di Pulau Sebesi, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pengembangan program daerah perlindungan laut, merupakan implementasi Rencana Strategis Pengelolaan Pesisir Lampung. Program ini adalah suatu upaya untuk mengatasi isu pengelolaan pulau-pulau kecil yang terdapat di Provinsi Lampung. Pada tahap awal pengembangan program ini, antusiasme dan dukungan masyarakat serta pemerintah cukup

tinggi untuk mengembangkan program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi ini. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah setelah inisiator program (Proyek Pesisir) mengakhiri bantuannya pada Bulan Desember 2002, daerah perlindungan laut Pulau Sebesi masih dapat berlanjut. Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Proyek Pesisir sebelum mengakhiri programnya di Provinsi Lampung adalah melakukan evaluasi terhadap keberlanjutan program yang telah diinisiasi. Dalam konteks pengembangan daerah perlindungan laut ini, evaluasi dilakukan untuk mengkaji aspek keberlanjutan (*sustainability*), akuntabilitas (*accountability*), dan replikabilitas (*replicability*).

Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari analisis keberlanjutan, akuntabilitas, dan replikabilitas program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi adalah:

- Mengkaji dampak implementasi Rencana Strategis Pengelolaan Pesisir Lampung
- Mengkaji parameter-parameter yang berpengaruh terhadap aspek keberlanjutan, akuntabilitas dan replikabilitas dari program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi.
- Menilai parameter-parameter mana saja yang belum terpenuhi dari ketiga aspek tersebut di atas.

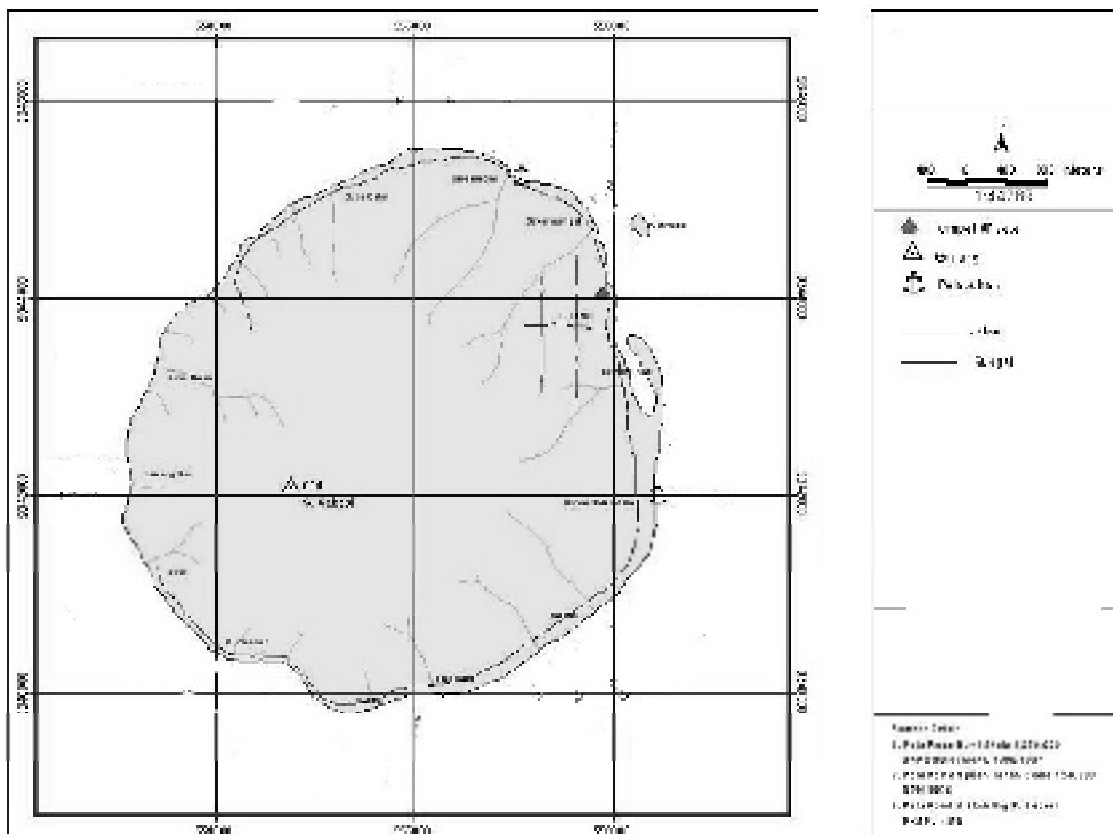
Sedangkan manfaat dari hasil studi ini adalah memberikan masukan bagi pengelola proyek, untuk melakukan perbaikan-perbaikan sebelum program berakhir.

2

Program Daerah Perlindungan Laut Pulau Sebesi

Gambaran Umum Pulau Sebesi

Secara geografis Pulau Sebesi terletak di Teluk Lampung tepatnya pada posisi 05055'37.43"-05058'44.48" LS dan 105027'30.50" - 105030'47.54" BT. Secara administrasi Pulau Sebesi termasuk dalam wilayah administrasi Desa Tejang Kecamatan Raja Basa Kabupaten Lampung Selatan. Luas Pulau Sebesi adalah 2620 ha dan panjang pantai 19,55 km, dimana sebagian besar daratan Pulau Sebesi tersusun dari endapan gunung api muda dan merupakan daratan perbukitan. Bukit tertinggi di Pulau Sebesi mencapai 884 meter dari permukaan laut dengan bentuk kerucut yang mempunyai tiga pucak. Akses menuju Pulau Sebesi dapat ditempuh dari pelabuhan Canti di Kalianda Lampung Selatan. Transportasi dari Canti ke Pulau Sebesi menggunakan perahu motor dengan frekuensi penyeberangan satu kali dalam sehari. Selain dari Canti, akses ke Pulau Sebesi juga dapat ditempuh dari Cilegon Jawa Barat dengan menggunakan perahu motor yang biasanya mengangkut kelapa dan kopra (Pemda Lampung, 2001).



Gambar 1. Peta Pulau Sebesi, Lampung Selatan

Penduduk pulau sebesi pada awalnya merupakan pendatang yang bekerja sebagai buruh di kebun kelapa yang dimiliki oleh tuan tanah, para buruh tersebut berdatangan ke Pulau Sebesi sejak 1913. Lama kelamaan buruh tersebut membentuk beberapa keluarga yang kemudian berkumpul membentuk sebuah kelompok. Sebagian besar penduduk di Pulau Sebesi bekerja sebagai buruh yaitu mencapai 57 % (365 jiwa). Sedangkan penduduk yang mempunyai pekerjaan selain buruh yaitu petani sebesar 17,2 % (110) jiwa, nelayan 16,7 % (107 jiwa), pedagang sebesar 1,4 % (9 jiwa), wiraswasta 6,6 % (42 jiwa), dan Pegawai negeri 1,1 % (7 jiwa). Penduduk Pulau Sebesi 58,2 % berasal dari Jawa (Jawa Tengah dan Banten), 32,2 % berasal dari Lampung, 8 % berasal dari Sunda, dan 1,6 % berasal dari Batak, Betawi, Padang, Palembang, dan Bima.

Ekosistem Terumbu Karang

Secara umum Pulau Sebesi dikelilingi oleh terumbu karang. Terumbu karang dapat ditemukan sampai kedalaman 10 meter dari permukaan air laut. Luas daerah terumbu karang di Pulau Sebesi dan Pulau Umang adalah 58,98 ha, dimana 31,64 ha berupa karang hidup dan penyusun terumbu karang lainnya dan 27,34 ha berupa karang mati, pecahan karang dan komponen abiotik. Hasil pengamatan terumbu karang yang dilakukan pada bulan Maret (Tabel 1) menunjukkan bahwa penutupan karang hidup di Pulau Sebesi berkisar antara 2,65 % - 63,83 %, yang berarti kualitas terumbu karang di Pulau Sebesi termasuk kategori buruk sampai baik. Jenis-jenis karang yang ditemukan antara lain adalah *Millepora*, *Acropora*, *Caulastrea*, *Echinopora*, *Favia*, *Favites*, *Fungia*, *Goniastera*, *Goniopora*, *Hydnophora*, *Leptoria*, *Lamnelia*, dan *Lobophyton*.

Tabel 1. Hasil pengukuran kualitas terumbu karang di DPL Pulau Sebesi

Lokasi	Parameter							
	H		E		C		% Penutupan	
	3 m	6 m	3 m	6 m	3 m	6 m	3 m	6 m
DPL1	1,36	1,50	0,53	0,63	0,55	0,34	27,10	10,06
DPL2	1,91	1,28	0,66	0,53	0,38	0,52	22,65	11,14
DPL3	1,88	1,86	0,68	0,68	0,24	0,38	37,60	44,98
DPL4	2,12	2,21	0,74	0,74	0,30	0,28	41,47	23,675

Sumber : Suhendra, 2002

Sementara itu, hasil monitoring Bulan Maret 2002 menunjukkan bahwa keanekaragaman ikan karang di daerah perlindungan laut pada kisaran sedang, kecuali pada DPL 4 dengan kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perairan yang dijadikan lokasi daerah perlindungan laut dalam kondisi tekanan lingkungan kuat sampai sedang. Dilihat dari jumlah spesies, sumberdaya ikan karang yang terdapat di daerah perlindungan laut Pulau Sebesi berkisar antara 19-34 spesies, dengan jumlah genus antara 14-24 genera dan jumlah famili antara 9-17 famili. Sementara itu jumlah individu yang ditemukan di masing-masing daerah perlindungan laut berkisar antara 207-330 individu. Untuk mengetahui seberapa besar nilai ekonomi sumberdaya pesisir Pulau Sebesi, Putra (2001) telah melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa nilai ekonomi sumberdaya pesisir Pulau Sebesi adalah sebesar Rp. 1.919.500.650,-. Nilai ini hanya merupakan manfaat langsung yang dihitung berdasarkan hasil tangkapan nelayan, sedangkan manfaat tidak langsung belum dimasukkan dalam perhitungan nilai ekonomi sumberdaya pesisir Pulau Sebesi. Hasil monitoring ikan karang yang dilakukan pada Bulan Maret 2002 disajikan pada Tabel 2.

Daerah Perlindungan Laut (DPL)

Pengembangan Daerah Perlindungan Laut(DPL) di Pulau Sebesi merupakan upaya masyarakat Pulau Sebesi untuk mempertahankan dan memperbaiki kualitas sumberdaya ekosistem terumbu karang dan sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumberdaya lainnya yang berasosiasi dengan terumbu karang. Tujuan dari daerah perlindungan laut adalah (1) memelihara fungsi ekologis dengan melindungi habitat tempat hidup, bertelur, dan memijah biota-biota laut, dan (2) memelihara fungsi ekonomis kawasan pesisir bagi masyarakat Pulau Sebesi dan sekitarnya, sehingga terjadi keberlanjutan dan produksi perikanan yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan baik dari hasil produksi perikanan maupun dari sektor pariwisata bahari.

Tabel 2. Hasil monitoring sumberdaya ikan karang di lokasi daerah perlindungan laut Pulau Sebesi Bulan Maret 2002.

Lokasi	H		E		C		Spesies		Genus		Famili		Individu	
	3 m	6 m	3 m	6 m	3 m	6 m	3 m	6 m	3 m	6 m	3 m	6 m	3 m	6 m
DPL1	2,93	2,70	0,83	0,85	0,07	0,09	34	24	24	16	17	10	319	169
DPL2	2,47	1,84	0,80	0,64	0,14	0,31	23	17	17	12	11	10	207	167
DPL3	2,65	2,36	0,81	0,76	0,10	0,17	27	22	18	17	13	11	330	249
DPL4	2,27	2,18	0,78	0,80	0,17	0,17	19	16	14	12	9	9	207	187

Sumber : Prasetiawan (2002)

Daerah perlindungan laut yang ditetapkan oleh masyarakat dibagi dalam dua zona atau kawasan, yaitu zona inti dan zona penyanggah, dimana pada zona tersebut diberlakukan ketentuan masing-masing. Namun pada dasarnya kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melindungi sumberdaya laut, yang kemudian akan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelarangan penggunaan alat-alat penangkapan ikan pada daerah perlindungan laut adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan ekosistem terumbu karang, yang pada tahap selanjutnya akan mempengaruhi sumberdaya ikan yang berasosiasi dengan ekosistem terumbu karang tersebut. Pemanfaatan hanya dilakukan secara terbatas dan menggunakan alat sederhana yang tidak merusak serta dilakukan pada waktu tertentu, yaitu ketika sumberdaya ikan sudah mengalami pemulihan (*recovery*).

Pada saat daerah perlindungan laut belum mampu menopang kehidupan masyarakat Pulau Sebesi, maka sistem sosial masyarakat Pulau Sebesi berupaya untuk mencari sumber-sumber energi (mata pencaharian alternatif) untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan sistem a kibat berkurangnya sumber energi dari la ut. Oleh karena itu, sebagian anggota masyarakat (komponen sistem) mencari ikan di tempat lain di luar kawasan daerah perlindungan laut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penentuan Pulau Sebesi sebagai kawasan daerah perlindungan laut dilakukan melalui dua tahap, yaitu pertama, penentuan wilayah pesisir di Provinsi Lampung dan kedua, pemilihan pulau kecil. Sebagaimana diketahui, wilayah pesisir Lampung secara umum dapat dibagi atas empat wilayah, yaitu pantai barat, pantai timur, Teluk Semangka dan Teluk Lampung, yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Untuk memilih salah satu wilayah pesisir tersebut sebagai lokasi pengembangan daerah perlindungan laut, dilakukan pemilihan lokasi berdasarkan kriteria yang telah disepakati oleh Proyek Pesisir dan Pemda Lampung, seperti pada Box 1. Dari keempat wilayah pesisir Lampung di atas, maka pesisir Teluk Lampung merupakan wilayah pesisir yang memenuhi keempat kriteria yang telah ditetapkan.

Box 1.

Kriteria Pemilihan Kawasan Pesisir Provinsi Lampung (Susanto, 2000)

- Wilayah tersebut memiliki pulau-pulau kecil;
- Wilayah tersebut terdapat isu-isu pengelolaan pesisir;
- Wilayah terpilih memiliki potensi pengembangan wisata bahari; dan
- Wilayah ini haruslah memiliki potensi sumberdaya pesisir, terutama terumbu karang.

Untuk tahap selanjutnya dilakukan penyeleksian pulau-pulau kecil yang terdapat di Teluk Lampung. Sebagaimana diketahui di perairan Teluk Lampung terdapat sekitar 40 pulau kecil. Pulau-pulau tersebut ada yang berpenghuni, dan banyak di antaranya tidak dihuni (Pemda Lampung, 2001). Seperti halnya dalam pemilihan kawasan pesisir, penyeleksian pulau-pulau kecil juga dilakukan berdasarkan kriteria yang disepakati oleh stakeholder. Berdasarkan kriteria seperti pada Box 2, maka pulau-pulau kecil yang terpilih dan memenuhi kriteria adalah pulau (a) Puhawang, (b) Legundi, (c) Sebesi-Sebuku.

Untuk menetapkan salah satu pulau dari keempat pulau di atas menjadi lokasi daerah perlindungan laut, maka pada awal bulan Juli 2000, diselenggarakan pertemuan *stakeholders* untuk membuat kriteria penetapan pulau kecil. Pada pertemuan tersebut telah disepakati kriteria pemilihan yang didasarkan pada aspek biofisik; aspek sosial ekonomi pertanian; dan aspek perikanan, seperti pada Box 3. Berdasarkan kriteria tersebut, maka Pulau Sebesi ditetapkan sebagai lokasi

Box 2.

Kriteria Penyeleksian Pulau-Pulau Kecil (Susanto, 2000)

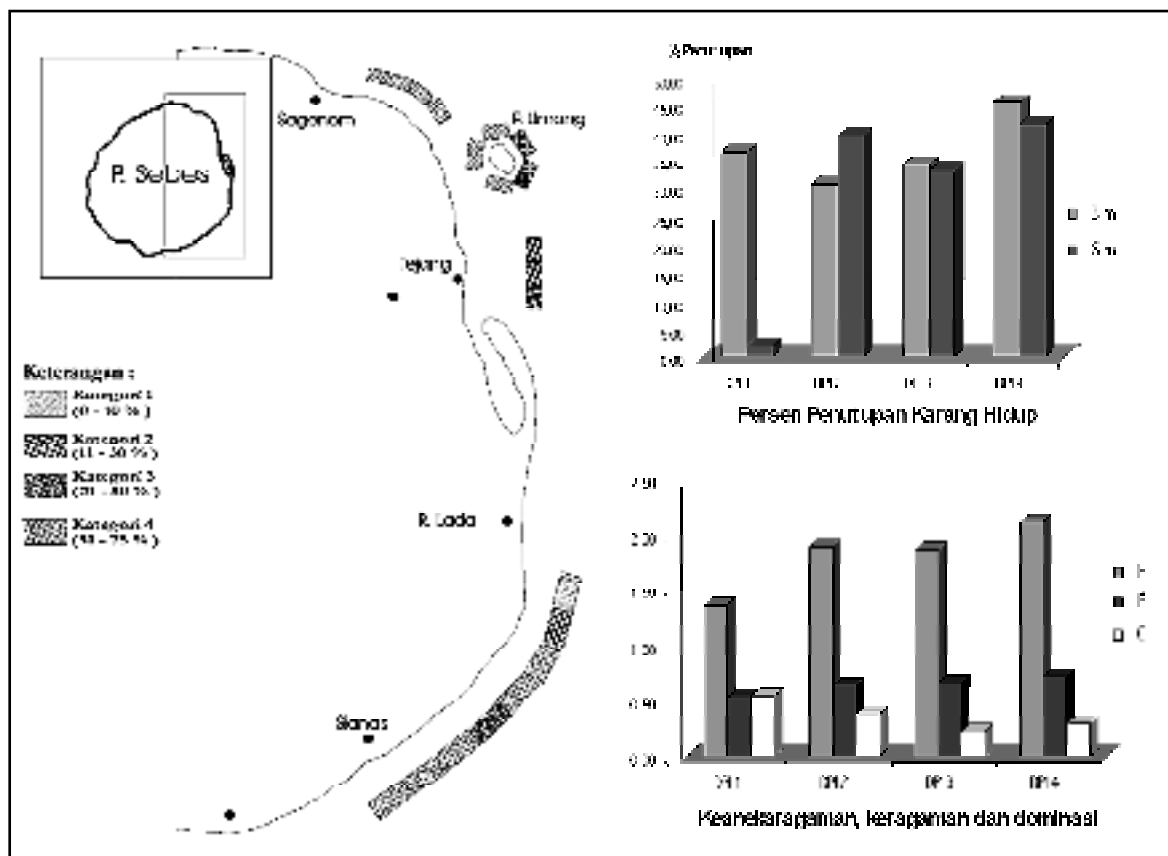
- Pulau tersebut merupakan pulau kecil yang berpenghuni atau berpenduduk;
- Kondisi terumbu karangnya relatif masih baik;
- Tingkat ketergantungan penduduk terhadap sumberdaya cukup tinggi;
- Keinginan masyarakat terhadap pengelolaan pesisir cukup tinggi;
- Adanya dukungan dari pemerintah setempat.

Box 3.

Kriteria Penentuan Daerah Pelindungan Laut (Susanto, 2000)

- Kondisi kualitas terumbu karang;
- Keanekaragaman hayati;
- Kondisi vegetasi mangrove dan vegetasi pantai lainnya;
- Konflik penggunaan sumberdaya pesisir;
- Daya tarik wisata
- Aksesibilitas masyarakat dari dan ke pusat kota/keramaian;
- Keinginan dan pengetahuan masyarakat terhadap kelestarian lingkungan;
- Sanitasi lingkungan masyarakat.

pengembangan daerah perlindungan laut. Daerah perlindungan laut Pulau Sebesi memiliki empat kawasan perlindungan laut, yaitu DPL 1 di dusun Sianas, DPL 2 dan 3 di dusun Tejang dan DPL 4 di dusun Segenom, seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Lokasi daerah perlindungan laut Pulau Sebesi

Metodologi Kajian

Kebutuhan data dan Informasi

Data yang digunakan untuk menganalisis aspek keberlanjutan, akuntabilitas, dan replikabilitas program daerah perlindungan laut adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui diskusi, wawancara, dan pengisian kuesioner. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui penelusuran berbagai pustaka yang ada. Secara umum data yang dikumpulkan terdiri dari:

a. Data Biofisik.

Data biofisik meliputi data potensi sumberdaya pesisir seperti ekosistem terumbu karang (luas dan kualitas, keanekaragaman, pola pemanfaatan selama ini), potensi perikanan (termasuk alat tangkap dan produksinya), dan ekosistem lainnya yang mendukung kegiatan ini.

b. Data Sosial Ekonomi dan Budaya.

Data sosial ekonomi meliputi jumlah penduduk, mata pencaharian, pendidikan, persepsi, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir, kecenderungan masyarakat memanfaatkan sumberdaya laut dan sebagainya, serta keinginan masyarakat.

c. Data Kelembagaan.

Data kelembagaan meliputi lembaga-lembaga yang ada di tingkat desa (formal dan non formal), kapasitas lembaga (dilihat dari kemampuan menjabarkan program), interaksi lembaga dengan pihak luar, program yang dibuat oleh lembaga yang ada, dan sebagainya.

d. Peraturan dan perundangan.

Meliputi seluruh peraturan dan perundangan baik pada level desa, kecamatan, kabupaten maupun provinsi, baik secara langsung dan tidak langsung mendukung pengembangan daerah perlindungan laut Pulau Sebesi.

Penentuan Responden

Responden yang diambil dalam kajian ini ditetapkan berdasarkan teknik purposive sampling dengan pertimbangan, bahwa responden adalah pelaku (individu atau lembaga) yang terlibat dalam pengembangan daerah perlindungan laut baik pada saat persiapan sampai pelaksanaan kegiatan di Pulau Sebesi, Lampung Selatan.

Responden terdiri dari para stakeholder, yaitu pemberi dana (donor), Pengelola Proyek (*Field Program Manager dan Extension Officer*), Pemerintah Daerah (Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi), Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan anggota masyarakat di Pulau Sebesi. Penentuan kategori responden di atas didasarkan pada pengamatan selama ini, dimana kelompok-kelompok *stakeholders* di atas yang memiliki keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan daerah perlindungan laut di Pulau Sebesi. Adapun target responden dalam penelitian ini adalah seperti disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Daftar responden penilaian aspek keberlanjutan, akuntabilitas dan replikabilitas program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi

No	Stakeholder	Responden
1	Pemberi Dana	Pahala Nainggolan (Admin & Finance)
2	Pengelola Proyek	Budy Wiryawan (Field Program Manager) Irfan Y. (Extention Officer)
3	Pemerintah Sekdes Tejang Kabupaten Provinsi	M. Noor Lubis (Sekdes) Syaiful Rivani (Bappeda Lampung Selatan) Syahrul (DKP-Lampung Selatan) A. M. Rony (Pemda Lampung) Faizal (Bappeda Lampung) Elvisar (DKP Lampung)
4	Perguruan Tinggi	Ali Kabul Mahi (Dosen) Indra Gumay (Dosen)
5	LSM	Herza (Mitra Bentala)
6	Masyarakat	Ahyar Abu Giyanto Busri HS Yayan M Ahmad Yani Herman S Sayuti Wawan M. Yusuf

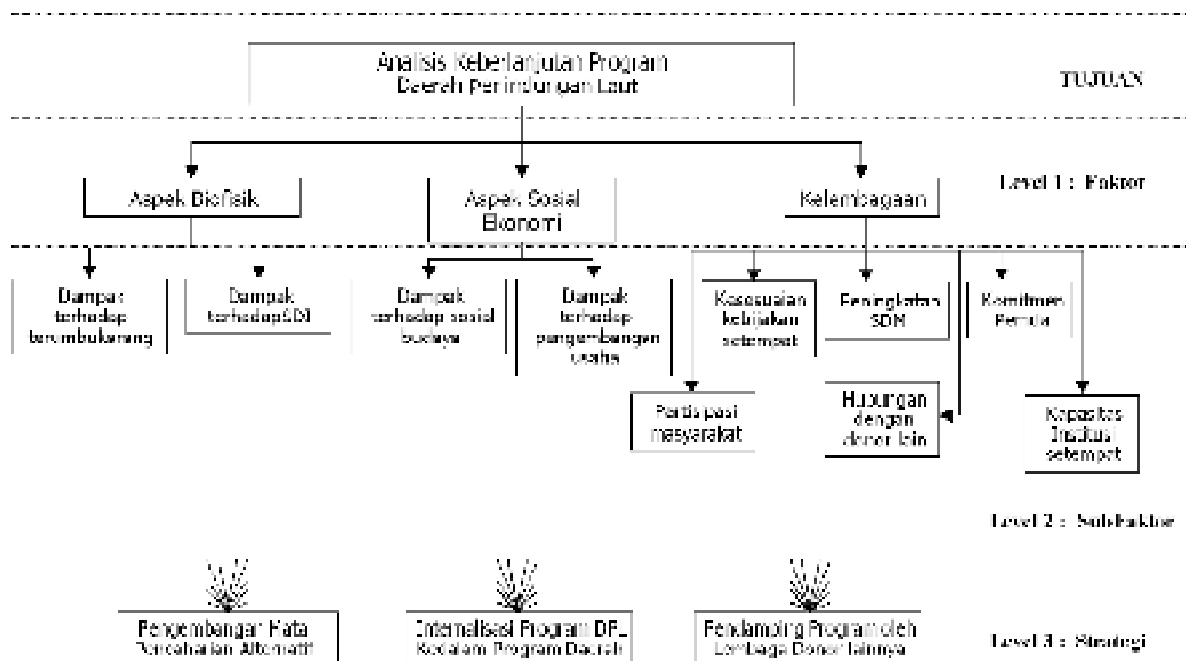
4

Analisis Data

Penentuan Parameter

Secara umum kajian ini bertujuan untuk melihat aspek keberlanjutan, akuntabilitas dan replikabilitas. Analisis keberlanjutan dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kemungkinan keberlanjutan program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi, pada saat Proyek Pesisir di Provinsi Lampung berakhir pada bulan Desember 2002. Analisis keberlanjutan difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu aspek biofisik, sosial-ekonomi-budaya dan kelembagaan (Gambar 3). Secara biofisik, daerah perlindungan laut memiliki tingkat keberlanjutan yang prospektif apabila memberikan dampak terhadap perbaikan kualitas terumbu karang dan sumberdaya ikan. Secara sosial-ekonomi-budaya, daerah perlindungan laut memiliki peluang keberlanjutan apabila dapat memberikan dampak terhadap perubahan atau perbaikan sosial-budaya masyarakat dan peningkatan ekonomi serta pengembangan usaha alternatif.

Secara kelembagaan, prospek keberlanjutan program daerah perlindungan laut dapat dilihat dari 6 (enam) parameter, yaitu (a) kesesuaian program daerah perlindungan laut dengan kebijakan setempat, baik kebijakan yang bersifat formal maupun informal pada setiap level (desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi); (b) komitmen Pemerintah Daerah Lampung dan institusi lainnya yang terkait untuk mengembangkan daerah perlindungan laut; (c) kemampuan dari institusi lokal, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk oleh



Gambar 3. Alur penentuan parameter keberlanjutan daerah perlindungan laut Pulau Sebesi

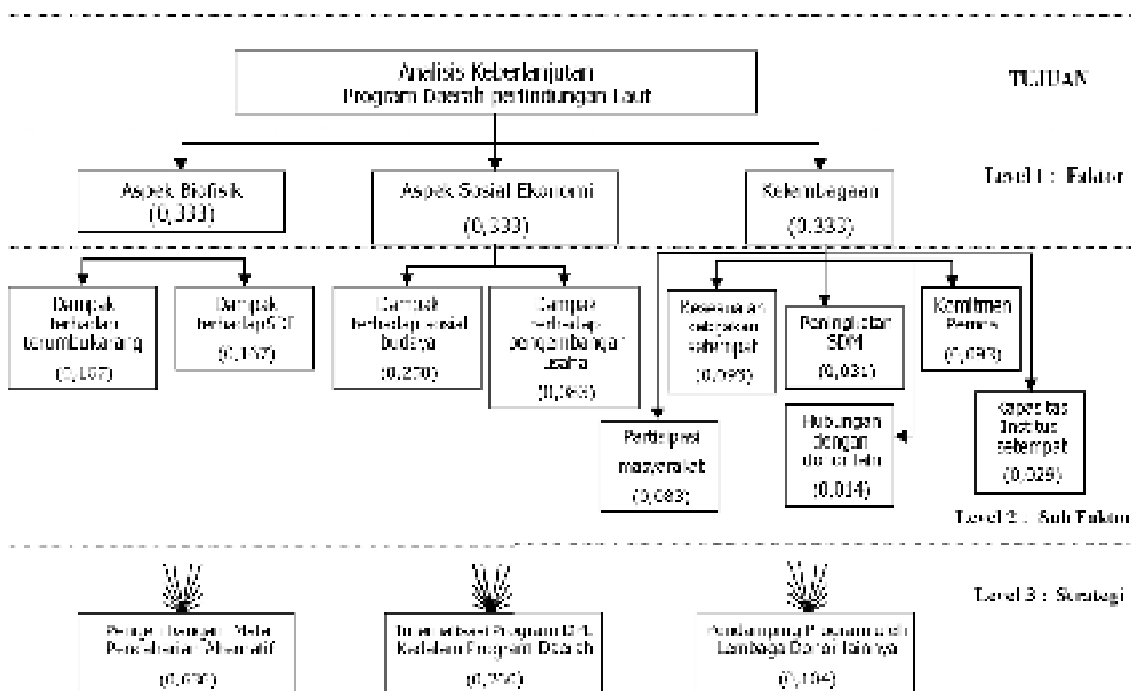
pengelola proyek; (d) penguatan sumberdaya manusia setempat; (e) partisipasi dari *stakeholders* dalam pengembangan daerah perlindungan laut; dan (f) hubungan antara proyek dengan donor lain.

Analisis akuntabilitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah selama pengembangan daerah perlindungan laut memiliki akuntabilitas yang tinggi. Untuk menilai aspek akuntabilitas pengembangan daerah perlindungan laut Pulau Sebesi difokuskan pada 3 (tiga) parameter, yaitu (a) efisiensi program daerah perlindungan laut, (b) proses implementasi pengembangan daerah perlindungan laut, dan (c) efektifitas daerah perlindungan laut dalam perbaikan ekosistem dan sosial ekonomi masyarakat. Analisis replikabilitas program daerah perlindungan laut dimaksudkan untuk mendapatkan informasi, kemungkinan program ini dapat direplikasi ke tempat-tempat lain. Aspek replikabilitas dikaji dari 4 (empat) parameter, yaitu (a) ketersediaan data dasar (baseline data); (b) relevansi program daerah perlindungan laut dengan kondisi dan situasi lokasi; (c) dampak terhadap lingkungan, ekonomi dan budaya; dan (d) penyebaran informasi daerah perlindungan laut.

Penentuan Bobot dan Skor

Penentuan bobot dari setiap parameter didasarkan pada tingkat kepentingan dari setiap parameter yang dikaji. Seperti terlihat pada Gambar 3, untuk menilai prospek keberlanjutan pengembangan daerah perlindungan laut terdapat 10 parameter, yaitu aspek biofisik dan sosial ekonomi budaya masing-masing 2 (dua) parameter dan aspek kelembagaan 6 (enam) parameter. Kesepuluh parameter di atas memiliki tingkat kepentingan yang berbeda dalam menentukan keberlanjutan program daerah perlindungan laut.

Untuk menentukan bobot dari masing-masing parameter digunakan Proses Hierarki Analitik (*Analytical Hierarchy Process, AHP*) dengan rumusan permasalahan seperti disajikan pada Gambar 3. Metode ini pada dasarnya adalah mengkuantifikasi pendapat para *stakeholders* yang dituangkan dalam bentuk kuesioner. Hasil analisis bobot untuk



Gambar 4. Hasil analisis bobot untuk setiap parameter yang mempengaruhi keberlanjutan daerah perlindungan laut Pulau Sebesi

setiap parameter yang mempengaruhi keberlanjutan daerah perlindungan laut disajikan pada Gambar 4.

Untuk parameter biofisik, baik yang berdampak terhadap terumbu karang maupun terhadap sumberdaya ikan memiliki bobot yang sama. Artinya tingkat kepentingan kedua parameter tersebut sama besar dalam menentukan keberlanjutan program Daerah Perlindungan Laut. Untuk parameter sosial ekonomi budaya, dampak terhadap sosial budaya lebih penting dibandingkan dampak terhadap pengembangan usaha alternatif. Sementara untuk parameter aspek kelembagaan, kesesuaian dengan kebijakan setempat, komitmen pemerintah daerah dan institusi lokal lainnya serta partisipasi masyarakat dipandang lebih penting dibandingkan tiga parameter yang lain, yaitu hubungan dengan donor lain, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kapasitas institusi lokal.

Dengan pendekatan yang sama, dilakukan penentuan bobot untuk parameter penilaian akuntabilitas dan replikabilitas program daerah perlindungan laut. Secara ringkas penentuan bobot untuk setiap parameter disajikan pada Tabel 4. Untuk penentuan nilai skor dari setiap parameter digunakan indikator sebagaimana disajikan pada Lampiran 1. Semakin banyak informasi yang menjadi indikator penilaian setiap parameter, semakin tinggi nilai skor yang diberikan. Nilai skor yang digunakan berkisar antara 0-3. Nilai 0 diberikan apabila program daerah perlindungan laut memberikan dampak negatif terhadap pengembangan dan pengelolaan sumberdaya pesisir Pulau Sebesi. Nilai tertinggi 3, apabila program ini memberikan dampak yang optimal dalam pengembangan sumberdaya pesisir di Pulau sebesi. Dalam menentukan tingkat keberlanjutan, akuntabilitas, dan replikabilitas program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi, digunakan tiga kategori berdasarkan nilai total skor dari setiap aspek di atas, yaitu: (1) Kategori Tinggi (2,1 - 3,0); (2) Kategori Sedang (1,1 - 2,0); dan (3) Kategori Rendah (0,0 - 1,0).

Tabel 4. Bobot dan skor untuk setiap parameter replikabilitas, akuntabilitas, dan replikabilitas

No	Parameter/Variabel	Bobot	Skor
A.	Aspek Keberlanjutan		
	A1. Aspek Biofisik	0,333	
	1. Dampak terhadap ekosistem terumbu karang	0,167	0-3
	2. Dampak terhadap sumberdaya ikan	0,167	0-3
	A2. Aspek Sosial Ekonomi Budaya	0,333	
	1. Dampak terhadap sosial budaya masyarakat	0,250	0-3
	2. Dampak terhadap pengembangan usaha	0,083	0-3
	A2. Aspek Kelembagaan	0,333	
	1. Kesesuaian daerah perlindungan laut dengan kebijakan setempat	0,093	0-3
	2. Komitmen Pemerintah Daerah dan institusi lokal lainnya	0,093	0-3
	3. Kapasitas institusi setempat	0,029	0-3
	4. Peningkatan sumberdaya manusia	0,031	0-3
	5. Partisipasi dari <i>stakeholders</i> utama	0,083	0-3
	6. Hubungan dengan donor lain	0,014	0-3
B.	Aspek Akuntabilitas		
	1. Efisiensi program daerah perlindungan laut	0,40	0-3
	2. Proses implementasi	0,20	0-3
	3. Efektifitas program/proyek	0,40	0-3
C.	Aspek Replikabilitas		
	1. Kelengkapan data dasar (<i>baseline data</i>)	0,30	0-3
	2. Relevansi program daerah perlindungan laut dengan kondisi/situasi lokasi	0,20	0-3
	3. Dampak proyek terhadap perbaikan lingkungan, ekonomi dan perilaku	0,30	0-3
	4. Penyerbarluasan informasi	0,20	0-3

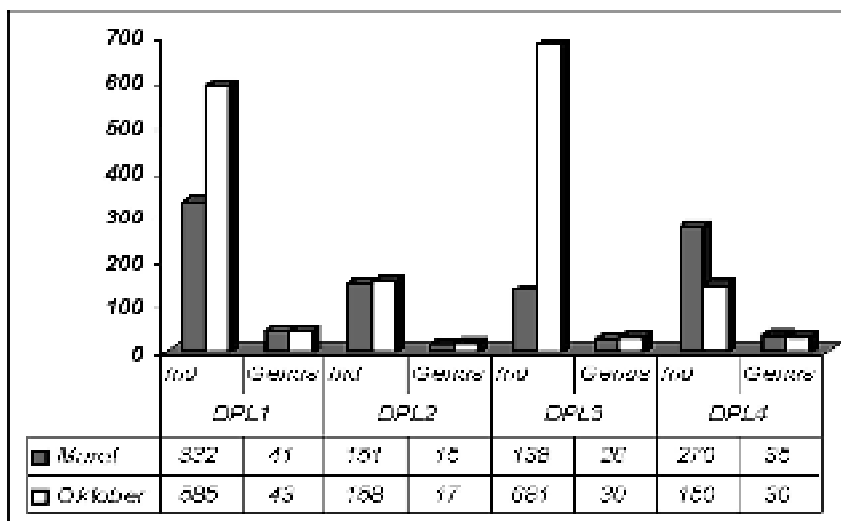
5

Analisis Aspek Keberlanjutan

Berdasarkan hasil analisis terhadap 10 parameter untuk menilai tingkat keberlanjutan program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi diperoleh nilai skor berkisar antara 1 sampai 3. Nilai skor tersebut didasarkan pada sejumlah informasi yang menjadi indikator penilaian dari setiap parameter yang digunakan dalam menilai tingkat keberlanjutan. Berikut adalah uraian dari setiap parameter untuk menentukan tingkat keberlanjutan program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi.

1. Dampak Daerah Perlindungan Laut Terhadap Perbaikan Kualitas Ekosistem Terumbu Karang (Nilai 2)

Secara konseptual daerah perlindungan laut bertujuan untuk melindungi sumberdaya laut melalui perlindungan kawasan terumbu karang dari berbagai kegiatan yang merusak. Oleh karena itu, dalam jangka panjang diharapkan terjadi peningkatan kualitas sumberdaya pesisir dan selanjutnya memberikan dampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Perbaikan kualitas ekosistem terumbu karang ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi lingkungan maupun bagisocial ekonomi masyarakat. Dalam konteks pengembangan daerah perlindungan laut Pulau Sebesi yang baru berjalan sekitar 12 bulan (Januari 2002), belum memperlihatkan perubahan yang signifikan dari perubahan kualitas lingkungan (ekosistem terumbu karang). Perubahan lingkungan yang terjadi dalam kurun waktu tersebut belum dapat dinilai secara jelas. Namun demikian, dari hasil monitoring yang dilakukan pada Bulan Maret dan Oktober 2002, telah menunjukkan adanya perbaikan kualitas terumbu karang. Seperti terlihat pada Gambar 5, terjadi peningkatan persen penutupan karang hidup, dari 43,18 % menjadi 58,72 %, dan sebaliknya terjadi penurunan persen



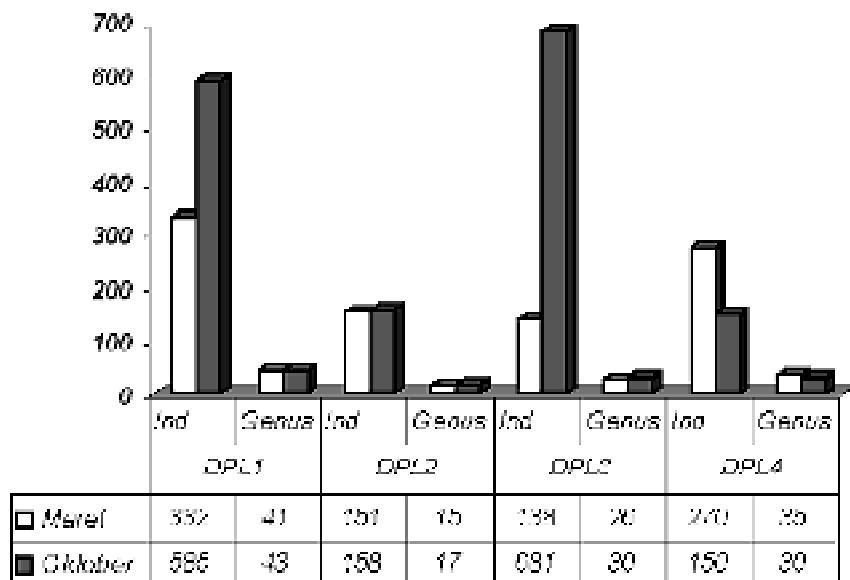
Gambar 5. Perbandingan kualitas terumbu karang hasil monitoring Bulan Maret dan Oktober 2002 di Pulau Sebesi pada kedalaman 3 m.

penutupan karang mati dari 47,57 % menjadi 35,4 %. Hal ini menunjukkan adanya dampak pengembangan daerah perlindungan laut terhadap perbaikan kualitas terumbu karang.

Dampak yang signifikan dari program pengembangan daerah perlindungan laut ini adalah adanya perubahan sikap dan pemahaman masyarakat setempat yang juga mempengaruhi perilaku masyarakat setempat dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir. Sebelum pengembangan program daerah perlindungan laut ini, beberapa masyarakat Pulau Sebesi masih melakukan kegiatan penangkapan dengan cara destruktif seperti penggunaan bom dan alat tangkap gardan. Namun semenjak adanya kegiatan pengembangan daerah perlindungan laut, perilaku yang bersifat merusak terus berkurang. Dampak lainnya adalah adanya kesepakatan masyarakat untuk melindungi ekosistem terumbu karang dari nelayan luar yang menggunakan alat tangkap dasar dan merusak terumbu karang. Perubahan sikap yang mendasar juga terlihat dari cara-cara penyelesaian sengketa antara nelayan luar (yang menggunakan gardan) dengan masyarakat Pulau Sebesi. Contoh kasus adalah penyelesaian masalah antara nelayan dari Desa yang tertangkap oleh nelayan Pulau Sebesi karena menggunakan alat tangkap gardan. Penyelesaiannya melalui musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti Dinas Perikanan dan Kelautan Lampung Selatan, Angkatan Laut dan Rukun Nelayan dari kedua pihak. Sebagai hasil kesepakatannya adalah nelayan yang menggunakan gardan diwajibkan membayar denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada pengelola Daerah Perlindungan Laut Pulau Sebesi. Dengan demikian, dampak secara nyata dari pengembangan daerah perlindungan laut adalah penurunan kegiatan-kegiatan yang bersifat destruktif.

2. Dampak Daerah Perlindungan Laut Terhadap Peningkatan Sumberdaya Ikan (nilai 2)

Hasil penelitian Prasetiawan (2002) menunjukkan adanya hubungan antara kualitas terumbu karang dengan kelimpahan dan jumlah genus ikan karang yang terdapat di daerah perlindungan laut Pulau Sebesi. Artinya apabila program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi mampu meningkatkan kualitas terumbu karang (persen penutupan karang hidup), akan secara langsung juga akan meningkatkan kualitas sumberdaya



Gambar 6. Perbandingan jumlah individu dan genus ikan karang hasil monitoring Bulan Maret dan Oktober 2002 di Pulau Sebesi.

ikan karang. Berdasarkan hasil pemantauan ikan karang yang dilakukan pada bulan Maret dan Oktober 2002 menunjukkan adanya peningkatan jumlah spesies dan jumlah genus pada beberapa lokasi daerah perlindungan laut. Seperti pada Gambar 6, terlihat terjadi peningkatan jumlah individu yang ditemukan pada DPL 1, 2 dan 3 dalam selang waktu Maret - Oktober 2002. Demikian juga jumlah genus yang ditemukan terjadi peningkatan pada DPL 1, 2 dan 3. Hal ini berarti pengembangan daerah perlindungan laut memberikan dampak terhadap peningkatan sumberdaya ikan karang. Pengembangan daerah perlindungan laut juga secara nyata memberikan dampak terhadap penurunan aktivitas pemanfaatan ikan karang dengan menggunakan teknik yang merusak seperti bom dan sianida.

3. Kesesuaian Daerah Perlindungan Laut dengan Aspek Sosial Budaya Masyarakat (nilai 3)

Masyarakat Pulau Sebesi pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai buruh yang mencapai 57 % dari jumlah penduduk Pulau Sebesi atau sekitar 365 jiwa. Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan petani sekitar 33 % atau sebanyak 217 jiwa. Selebihnya adalah pedagang, wiraswasta dan pegawai negeri (Pemda Lampung, 2002). Dari gambaran di atas, terlihat bahwa sedikitnya sekitar 217 jiwa memiliki ketergantungan terhadap sumberdaya pesisir (sumberdaya ikan dan biota lainnya) untuk memenuhi kelangsungan hidup mereka. Sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, umumnya memiliki alat tangkap sederhana (perahu dan alat tangkap). Dengan demikian, umumnya lokasi penangkapan (fishing ground) nelayan Pulau Sebesi berada di sekitar Pulau Sebesi (sekeliling pulau) dan merupakan kawasan dimana terdapat ekosistem terumbu karang. Dengan demikian, kerusakan terumbu karang akan mempengaruhi mata pencaharian mereka. Pengembangan program daerah perlindungan laut ini secara sosial ekonomi tentunya sangat relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Pulau Sebesi. Kerusakan terumbu karang akan berdampak terhadap kelangsungan mata pencaharian nelayan di Pulau Sebesi.

Kesesuaian program daerah perlindungan laut dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat juga tercermin dari hasil studi yang dilakukan oleh Izaryadi (2001) yang mengkaji tingkat partisipasi masyarakat Pulau Sebesi dalam pengelolaan sumberdaya pesisir. Hasil studi menunjukkan bahwa sekitar 47 % masyarakat nelayan Pulau Sebesi memiliki peran yang sangat besar dalam pelestarian sumberdaya terumbu karang dengan mencegah tindakan-tindakan destruktif, seperti penggunaan bom, sianida, dan pengoperasian gardan oleh nelayan dari luar Pulau Sebesi. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang erat antara mata pencaharian nelayan dengan pemahaman terhadap ekosistem terumbu karang. Artinya masyarakat Pulau Sebesi yang berprofesi sebagai nelayan utama (tidak memiliki mata pencaharian selain menangkap ikan) memiliki tingkat pemahaman yang tinggi terhadap ekosistem terumbu karang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program daerah perlindungan laut yang bertujuan melindungi ekosistem terumbu karang dari berbagai kegiatan yang bersifat destruktif, tentunya sejalan dengan kondisi sosial masyarakat setempat, baik yang secara langsung terkait dengan keberadaan terumbu karang (nelayan) maupun yang tidak terkait secara langsung.

4. Dampak Daerah Perlindungan Laut terhadap Pengembangan Usaha Alternatif (Nilai 1)

Di dalam konsep pengembangan dan pengelolaan daerah perlindungan laut diharapkan dapat memberikan dampak terhadap pengembangan usaha-usaha

alternatif yang sifatnya sinergis. Dalam konteks pengembangan daerah perlindungan laut Pulau Sebesi, pengembangan usaha yang cukup relevan adalah pengembangan daerah wisata bahari. Hal ini memungkinkan karena Pulau Sebesi terletak di sekitar kawasan Gunung Krakatau. Apabila program daerah perlindungan laut ini berhasil dalam hal pemeliharaan dan peningkatan kualitas terumbu karang, maka Pulau Sebesi akan menjadi lokasi kunjungan wisata bahari khususnya wisata selam. Mengingat kondisi terumbu karang di sekitar Selat Sunda pada umumnya telah mengalami kerusakan.

5. Kesesuaian Daerah Perlindungan Laut dengan Kebijakan Setempat (nilai 2)

Secara umum program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi tidak bertentangan dengan kebijakan-kebijakan setempat, baik pada tingkat provinsi, kabupaten, maupun desa. Bahkan tujuan dari program daerah perlindungan laut sejalan dengan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan Lampung. Pada kebijakan tingkat Provinsi Lampung, daerah perlindungan laut sesuai dengan Perda Nomor 1 tahun 2000 dengan kebijakan pemulihan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan manusia. Sementara pada tingkat Kabupaten, program daerah perlindungan laut sejalan dengan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan Lampung Selatan, sebagai bagian dari Program Pengawasan, Perlindungan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan. Pada tingkat di desa, program daerah perlindungan laut sesuai dengan kebijakan pengamanan laut, yaitu Surat Keputusan Keamanan Laut : SK No. 66/RN-SBG/VI 1999 yang memuat tiga keputusan, yaitu (1) menggalang kesatuan dan kekompakan anggota nelayan; (2) membentuk tiga regu keamanan laut yang beranggotakan 45 orang; dan (3) menangani permasalahan-permasalahan pengelolaan laut.

Meskipun program daerah perlindungan laut sesuai dengan kebijakan setempat, namun sampai saat ini belum ada aturan khusus yang dikeluarkan untuk mendukung program tersebut, baik pada tingkat provinsi, kabupaten maupun di tingkat desa. Upaya untuk menerbitkan aturan khusus untuk mendukung program daerah perlindungan laut saat ini sedang dipersiapkan. Pada tingkat desa, Pemerintah Desa Tejang Pulau Sebesi akan menerbitkan Keputusan Desa yang akan mengatur pelaksanaan daerah perlindungan laut tersebut. Sedangkan pada tingkat kabupaten, sedang dipersiapkan Rencana Tata Ruang dan Pengelolaan Pesisir Kabupaten Lampung Selatan yang mana program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi akan dimasukkan dalam materi Peraturan Daerah tersebut.

6. Komitmen Institusi Setempat Mengelola daerah Perlindungan Laut (nilai 3)

Dari beberapa institusi yang selama ini terlibat dalam program-program pengelolaan pesisir di Provinsi Lampung, seperti pemerintah melalui lembaga terkait (Bappeda dan Dinas Kelautan dan Perikanan), perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat, pada umumnya memiliki komitmen untuk mendukung program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi. Namun demikian, masing-masing lembaga akan memberikan komitmen dan bantuan sesuai dengan fungsinya. Lembaga-lembaga pemerintah pada tingkat Provinsi akan lebih fokus pada fungsi koordinasi, sedangkan pada tingkat kabupaten akan memberikan bantuan melalui integrasi program-program lembaga yang mendukung program daerah perlindungan laut tersebut. Demikian juga dengan lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi akan membantu

sesuai dengan fungsi dan peran, seperti bantuan teknis dan ilmiah oleh Perguruan Tinggi dan penguatan keswadayaan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat.

Hingga tahun 2002, baik lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat belum memiliki program-program pengelolaan sumberdaya pesisir untuk mendukung pengembangan daerah perlindungan laut Pulau Sebesi. Hal ini dikarenakan hingga tahun 2002, berbagai program pengembangan daerah perlindungan laut tersebut masih lebih banyak dilakukan oleh Proyek Pesisir. Namun pada tahun 2003, pada saat inisiator program (Proyek Pesisir) berakhir, maka lembaga-lembaga tersebut akan memberikan bantuannya. Pada tahun 2003, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung akan mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan daerah perlindungan laut. Sedangkan pada tahun 2002 ini, program-program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang terkait dengan program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi adalah program Sistem Pengawasan Masyarakat dan Operasi laut untuk Pengawasan.

7. Kemampuan Institusi Setempat dalam Mengelola Daerah Perlindungan Laut (nilai 2)

Institusi setempat (yang terdapat di Pulau Sebesi) terdiri dari intitusi formal dan non formal. Institusi formal yang ada antara lain adalah Rukun Nelayan, Karang Taruna, Koperasi Tani dan Nelayan, dan Seksi Keamanan. Sedangkan institusi non formal adalah Sikam Salamban, Sikam Muahi, dan Risma. Rukun Nelayan Mina Bahari Pulau Sebesi merupakan organisasi nelayan yang ada di Pulau Sebesi yang beranggotakan sekitar 100 orang nelayan. Organisasi ini merupakan organisasi yang melakukan pembinaan akan arti penting lingkungan dan wadah aspirasi bagi anggotanya. Karang Taruna merupakan organisasi pemuda yang ada di Desa Tejang. Koperasi Tani dan Nelayan merupakan koperasi yang ada di Desa Tejang yang saat ini belum aktif dan hanya mengelola hasil Nilam dengan modal dari investor yang berasal dari Jakarta. Keamanan Laut merupakan organisasi yang dibentuk oleh desa di tiap-tiap dusun pada tahun 1999 atas dasar kesadaran masyarakat akan arti pentingnya penjagaan lingkungan dari pengrusakan. Organisasi ini bertugas untuk menjaga laut dari pengrusakan lingkungan yang dilakukan oleh nelayan luar atau pun nelayan Pulau Sebesi itu sendiri.

Sikam Salamban dan Sikam Muahi merupakan organisasi sosial yang beranggotakan beberapa keluarga guna menghimpun dana untuk digunakan oleh anggota yang tertimpa musibah seperti sakit dan meninggal dunia dan keperluan hajatan. Risma merupakan organisasi pemuda yang berbasis masjid, organisasi ini berada di tiap-tiap masjid yang berada pada tiga



dusun. Risma melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hari-hari besar umat Islam, seperti peringatan Isra' Mi'raj Maulud Nabi, kegiatan Bulan Ramadhan dan beberapa kegiatan lainnya.

Dalam konteks pengelolaan daerah perlindungan laut, inisiator program telah membentuk sebuah lembaga baru yang disebut dengan Badan Pengelola Daerah Perlindungan Laut (DPL) Pulau Sebesi. Adapun tugas dari badan pengelola ini adalah:

- Membuat perencanaan pengelolaan daerah perlindungan laut yang disetujui oleh masyarakat melalui keputusan bersama.
- Bertanggung jawab dalam perencanaan lingkungan hidup untuk Pengelolaan Wilayah Perlindungan Laut yang berkelanjutan.
- Mengatur, menjaga pelestarian dan pemanfaatan wilayah yang dilindungi untuk kepentingan masyarakat.
- Melakukan pengawasan dan berhak melakukan penangkapan terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan dalam keputusan ini.
- Melaksanakan penyitaan, dan pemusnahan atas barang dan atau alat-alat yang dipergunakan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama masyarakat.

8. Penguatan Sumberdaya Manusia (nilai 3)

Pengembangan daerah perlindungan laut Pulau Sebesi juga diikuti program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, pendampingan dan penyediaan bantuan teknis. Program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang telah dilaksanakan adalah (1) pengiriman anggota masyarakat ke Sulawesi Utara untuk studi banding tentang Pengelolaan Terumbu Karang di Desa Blongko, Talise, dan Taman Nasional Bunaken; (2) pelatihan pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat untuk penyiapan kader di Desa Tejang Sebesi dan Pematang Pasir; (3) pelatihan pengolahan hasil perikanan tradisional; dan (4) pelatihan monitoring (manta tow). Program-program di atas, secara langsung atau tidak langsung telah meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia di Pulau Sebesi, terutama dalam hal (a) terbentuknya Badan Pengelola Daerah Perlindungan Laut; (b) kemampuan masyarakat membuat aturan pengelolaan daerah perlindungan laut; dan (c) kemampuan memahami permasalahan pengelolaan terumbu karang (monitoring terumbu karang).

Program lain yang dilakukan adalah program pendampingan masyarakat yang akan membantu masyarakat setempat dalam mempersiapkan upaya-upaya pengelolaan sumberdaya pesisir, yaitu (1) penempatan *Extension Officer* (penyuluh lapangan dari luar Pulau Sebesi) satu orang mulai dari awal sampai akhir; dan



Pelatihan penyiapan Kader Pengelola Pesisir dan Laut

(2) pengangkatan asisten penyuluh lapangan dari masyarakat setempat (dua orang). Penyuluh lapangan berfungsi sebagai jembatan antara manajemen proyek dan masyarakat desa. Tugas penyuluh lapangan adalah (a) fasilitator dan mediator antara Proyek Pesisir, pemerintah dan masyarakat; (b) membantu proses pelaksanaan proyek dengan bantuan asisten dan tanggungjawab terhadap proyek; dan (c) membangun motivasi masyarakat desa dalam upaya pengelolaan pesisir.

Selain program pendampingan, peningkatan kapasitas SDM juga dilakukan melalui penyediaan bantuan teknis. Bantuan teknis yang telah dilakukan adalah (a) tenaga asistensi monitoring terumbu karang (Mahasiswa IPB); (b) pelatihan pengolahan ikan; dan (c) pelatihan tentang organisasi. Pelatihan monitoring terumbu karang dimaksudkan untuk memberikan keterampilan kepada masyarakat dan pengelola daerah perlindungan laut bagaimana melakukan monitoring terumbu karang. Pelatihan organisasi dilaksanakan oleh Yayasan Mitra Bentala yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang berorganisasi dan pemahaman tentang posisi dan kekuatan dari suatu organisasi. Sedangkan pelatihan pengolahan ikan dilaksanakan oleh jurusan Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan khususnya bagi ibu-ibu tentang bagaimana mengolah ikan dengan mutu yang baik.

9. Partisipasi *Stakeholders* (nilai 3)

Ketika inisiator program menetapkan Pulau Sebesi sebagai lokasi implementasi program pengelolaan pesisir berbasis masyarakat, salah satu kriteria yang digunakan dalam pemilihan lokasi adalah adanya keinginan dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir berkelanjutan. Alasannya adalah apabila kriteria ini dipenuhi, maka diharapkan program-program perlindungan sumberdaya laut akan mudah diterima oleh masyarakat dan tentunya keterlibatan mereka dalam program tersebut tinggi. Dalam konteks keterlibatan masyarakat dalam suatu program pengelolaan pesisir, terdapat tiga tingkatan partisipasi, yaitu partisipasi sebatas pada memberi informasi (tingkat informasi), partisipasi sebatas target konsultasi, dan partisipasi sebagai pemilik program. Dalam pengembangan daerah perlindungan laut Pulau Sebesi, partisipasi tingkat informasi terjadi pada saat inisiator program akan memilih satu pulau dari beberapa pulau untuk dijadikan lokasi implementasi program. Partisipasi tingkat konsultasi terjadi pada saat inisiator baru mulai menempatkan penyuluh lapangan di Pulau Sebesi. Sedangkan partisipasi tingkat pemilik terjadi pada saat inisiator sudah membentuk Kelompok Badan Pengelola. Setelah berjalan sekitar setahun, inisiator program telah membentuk Badan Pengelola daerah perlindungan laut yang beranggotakan 22 orang yang berasal dari masyarakat Pulau Sebesi.

Semenjak dibentuk, Badan Pengelola inilah yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi. Inisiator program melalui staf penyuluh lapangan hanya menjadi pendamping dalam meningkatkan kemampuan dari setiap anggota Badan Pengelola. Dengan demikian, tingkat partisipasi dari *stakeholders* dalam program daerah perlindungan laut ini adalah sebagai pemilik dan diharapkan mampu menjalin kerjasama antar lembaga yang ada di Pulau Sebesi sehingga tercipta sistem pengelolaan yang terpadu di antara komponen *stakeholders*.

10. Hubungan dengan donor lain (nilai 1)

Salah satu faktor yang dapat memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan program daerah perlindungan laut adalah adanya program-program sinergis yang terdapat di sekitar lokasi. Program-program yang sinergis ini diharapkan dapat mengurangi tekanan atau mengalihkan tekanan dari kawasan yang dilindungi ke lokasi kegiatan lain yang sinergis tersebut. Saat ini, program-program pengelolaan pesisir yang terdapat di sekitar lokasi daerah perlindungan laut yang sejalan dengan program daerah perlindungan laut adalah pembuatan terumbu buatan yang didanai oleh *Nihon University* Jepang. Program terumbu buatan ini dapat menjadi lokasi penelitian untuk tujuan ilmiah yang akan memberikan kontribusi bagi pengembangan pengelolaan terumbu karang di Pulau Sebesi.



Terumbu buatan di Pulau Sebesi

Kegiatan lainnya yang berjalan sinergis dengan program daerah perlindungan laut adalah pemasangan rumpun oleh nelayan setempat. Pemasangan rumpun di luar kawasan daerah perlindungan laut ini akan mengurangi tekanan terhadap pemanfaatan sumberdaya perikanan di kawasan daerah perlindungan laut. Masyarakat yang selama ini melakukan penangkapan ikan di kawasan daerah perlindungan laut akan memindahkan lokasi penangkapan ikan pada lokasi dimana terdapat rumpun yang telah dipasang oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, keberadaan daerah perlindungan laut tidak mengganggu mata pencaharian nelayan setempat.

Selain kedua program di atas, pengelola daerah perlindungan laut juga saat ini sedang menjajaki kemungkinan mendapatkan dana dari donor lain, seperti Pemerintah Daerah Lampung Selatan, melalui pengajuan proposal untuk mendapatkan dana rutin pengelola sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) pertahun. Untuk meningkatkan kemampuan Badan Pengelola dalam rangka mendapatkan bantuan dari sumber-sumber lain, terutama pada saat Proyek Pesisir berakhir, maka staf penyuluh lapangan saat ini membantu Badan Pengelola untuk menyusun proposal yang akan disampaikan ke lembaga-lembaga donor. Diharapkan setelah Proyek Pesisir berakhir Badan Pengelola telah mendapatkan lembaga baru yang dapat membantu menyediakan dana operasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka pada Tabel 5 disajikan ringkasan penilaian tingkat keberlanjutan program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi. Pada Tabel 5 tersebut terlihat bahwa total perkalian antara bobot dan skor kesepuluh parameter untuk menilai tingkat keberlanjutan adalah 2,380. Hal ini berarti bahwa indikasi keberlanjutan program daerah perlindungan laut ini cukup tinggi. Dengan demikian, harapan akan

Tabel 5. Ringkasan penilaian tingkat keberlanjutan program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi

No	Parameter/Variabel	Bobot	Skor	Jumlah
A.	Aspek Biofisik	0,333		
	1. Dampak terhadap ekosistem terumbu karang	0,167	1	0,334
	2. Dampak terhadap sumberdaya ikan	0,167	2	0,334
B.	Aspek Sosial Ekonomi Budaya	0,333		
	1. Dampak terhadap sosial budaya masyarakat	0,250	3	0,750
	2. Dampak terhadap pengembangan usaha	0,083	1	0,083
C.	Aspek Kelembagaan	0,333		
	1. Kesesuaian daerah perlindungan laut dengan kebijakan setempat	0,093	2	0,186
	2. Komitmen Pemerintah Daerah	0,093	3	0,279
	3. Kapasitas institusi setempat	0,029	2	0,058
	4. Peningkatan sumberdaya manusia	0,031	3	0,093
	5. Partisipasi dari <i>stakeholders</i> utama	0,083	3	0,249
	6. Hubungan dengan donor lain	0,014	1	0,014
	Jumlah	1,00		2,380

keberlanjutan program daerah perlindungan laut di Pulau Sebesi setelah Proyek Pesisir berakhir cukup tinggi.

Indikasi tingkat keberlanjutan sebagaimana diuraikan di atas, belum menjadi jaminan bahwa program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh masyarakat dengan fasilitasi Proyek Pesisir selama persiapan program ini. Diperlukan upaya-upaya lain yang dapat menjaga agar program ini benar-benar terus berlanjut, sehingga tujuan dari perlindungan sumberdaya alam pesisir Pulau Sebesi dapat dicapai. Dalam konteks strategi pengembangan daerah perlindungan laut setelah berakhirnya bantuan inisiator proyek, terdapat tiga strategi yang diidentifikasi oleh inisiator proyek. Dari ketiga strategi tersebut kemudian dinilai oleh *stakeholders* mana yang paling prioritas untuk dijalankan menurut mereka guna menjaga keberlanjutan program daerah perlindungan laut ini. Ketiga strategi tersebut berdasarkan urutan prioritas, sebagaimana disajikan pada Gambar 5, adalah sebagai berikut:

- **Prioritas Pertama:** Mengembangkan mata pencaharian alternatif sebagai kompensasi dari tidak dimanfaatkannya sumberdaya pesisir yang terdapat di kawasan daerah perlindungan laut. Mata pencaharian alternatif yang disarankan adalah pengembangan keramba terutama keramba dasar, pengembangan rumpon dan pengembangan pengolahan hasil-hasil laut.
- **Prioritas Kedua:** Internalisasi program daerah perlindungan laut ke dalam program tahunan pemerintah daerah, sehingga pengelolaan daerah perlindungan laut senantiasa mendapatkan bantuan dan pembinaan dari pemerintah daerah.
- **Prioritas Ketiga:** adanya program pendampingan lanjutan oleh lembaga donor lain sebagaimana yang dilaksanakan oleh Proyek Pesisir selama ini.

Analisis Aspek Akuntabilitas

Seperti halnya dengan penilaian terhadap aspek keberlanjutan, penilaian terhadap akuntabilitas program daerah perlindungan laut juga berkisar antara 1 sampai 3. Nilai tersebut didasarkan atas indikator dari masing-masing parameter yang digunakan dalam menilai aspek akuntabilitas. Berikut adalah uraian dari masing-masing parameter untuk menilai akuntabilitas program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi.

1. Efisiensi Program Daerah Perlindungan Laut (nilai 3)

Seperti halnya dengan program-program lainnya yang dilaksanakan oleh Proyek Pesisir, program daerah perlindungan laut memiliki kerangka kerja secara umum yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan Proyek Pesisir Lampung, dimana program daerah perlindungan laut merupakan program yang dicanangkan pada Program Kerja Tahun ke 5 (2001-2002) (Workplan Year 5). Rencana kerja tahunan selanjutnya dijabarkan menjadi rencana kerja bulanan (monthly activity/program). Kerangka kerja yang terdapat dalam Rencana Kerja Tahunan menyangkut aspek tujuan, *output*, dan waktu pelaksanaan setiap program. Agar kerangka kerja tersebut lebih operasional, maka dijabarkan secara rinci berdasarkan kerangka waktu yang tersedia.

Demikian juga halnya dengan sistem pendanaan, penanggungjawab program mengajukan permintaan dana kepada pemberi dana berdasarkan kerangka kerja bulanan yang telah dirinci. Anggaran yang dikeluarkan harus sesuai dengan mata anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dan berdasarkan volume pekerjaan yang dilaksanakan setiap bulan. Pertanggungjawaban anggaran dilakukan pada bulan berikutnya. Dengan demikian, akuntabilitas dari penggunaan dana dalam pengembangan daerah perlindungan laut cukup baik. Apabila terjadi perubahan-perubahan, maka pihak pengelola dan pemberi dana dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan. Adanya komunikasi yang berjalan lancar antara pengelola dan pemberi dana, sangat membantu dalam menangani kendala-kendala yang muncul dari pelaksanaan program ini.

2. Proses Implementasi (nilai 2)

Sejalan dengan pengembangan program daerah perlindungan laut, inisiator program juga menyiapkan kerangka monitoring untuk memantau keberhasilan dari implementasi program tersebut. Pemantauan dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk melihat perkembangan dari ekosistem terumbu karang dan biota-biota laut yang berasosiasi di dalamnya. Untuk menyiapkan kerangka monitoring, staf lapangan memberikan bantuan teknis kepada pengelola bagaimana melakukan kegiatan monitoring. Diharapkan hasil monitoring tersebut akan dijadikan bahan bagi perbaikan program daerah perlindungan laut.

Dalam proses implementasi program daerah perlindungan laut, komunikasi antara pemberi dana, pengelola dan masyarakat dilakukan dalam dua arah, dalam arti

masyarakat dan pengelola (melalui Program Manajer Lapangan) memberikan laporan bulan kepada pemberi dana. Berdasarkan laporan tersebut pemberi dana melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelola program di lapangan.

3. Efektifitas Program Daerah Perlindungan Laut (nilai 1)

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa secara fisik dampak program daerah perlindungan laut terhadap perbaikan lingkungan belum dapat dinilai secara jelas, karena program ini baru berjalan selama 12 bulan. Namun dampak yang terlihat adalah adanya perubahan sikap masyarakat ke arah positif dalam mengelola sumberdaya pesisir secara berkelanjutan. Hal ini diindikasikan berkurangnya kegiatan-kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara destruktif dan perubahan kualitas sumberdaya terumbu karang dan ikan karang. Demikian juga kegiatan destruktif lainnya yang dilakukan oleh masyarakat luar di sekitar kawasan pesisir Pulau Sebesi berkurang berkat adanya pengawasan dari masyarakat. Artinya program daerah perlindungan laut di Pulau Sebesi memberikan dampak terhadap perubahan sikap masyarakat dan penurunan aktivitas yang merusak lingkungan.

Ringkasan penilaian akuntabilitas program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi dapat dilihat pada Tabel 6. Berdasarkan penilaian terhadap ketiga parameter yang mempengaruhi tingkat akuntabilitas, dapat dikatakan bahwa pengembangan program daerah perlindungan laut memiliki tingkat akuntabilitas sedang, yang diindikasikan oleh total nilai skor ketiga parameter yang berada pada kisaran 1,10 - 2,00. Kategori ini pada dasarnya masih dapat ditingkatkan karena indikator efektifitas program dapat dievaluasi manakala program ini telah berjalan dengan rentang waktu yang memadai (2 tahun), terutama untuk mengevaluasi dampak terhadap perbaikan lingkungan (ekosistem terumbu karang dan sumberdaya ikan karang) dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Meskipun tingkat akuntabilitas masih dalam kategori sedang, namun hal terpenting dari pengembangan program daerah perlindungan laut ini adalah pelaksanaan program selama ini telah dilakukan berdasarkan kerangka kerja yang telah disusun dengan komunikasi antara pelaksana program dan pemberi dana, sehingga nilai-nilai transparansi dan keterbukaan yang menjadi landasan dalam pencapaian tujuan program dapat diterapkan.

Tabel 6. Ringkasan penilaian akuntabilitas program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi

No	Parameter/variabel	Bobot	Skor	Jumlah
1.	Efisiensi program daerah perlindungan laut 0,40	3	1,20	
2.	Proses implementasi	0,20	2	0,40
3.	Efektifitas program dan proyek	0,40	1	0,40
	Total	1,00		2,00

Analisis Aspek Replikabilitas

Untuk melihat kemungkinan program daerah perlindungan laut direplikasi di lokasi lain, analisis difokuskan pada empat parameter seperti diuraikan sebelumnya. Hasil penilaian dari setiap parameter untuk aspek replikabilitas berkisar antara 1 sampai 3, yang didasarkan pada indikator dari setiap parameter tersebut. Berikut adalah uraian dari masing-masing parameter penilaian aspek replikabilitas program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi.

1. Kelengkapan Data Dasar (nilai 3)

Untuk mendukung program daerah perlindungan laut dan pengelolaan Pulau Sebesi secara luas, disusun Rencana Pengelolaan Pulau Sebesi yang saat ini sedang dipersiapkan oleh masyarakat Pulau Sebesi. Penyusunan Rencana Pengelolaan ini didasarkan pada isu yang telah diidentifikasi sebelumnya dan dituangkan dalam Profil Sumberdaya Pesisir Pulau Sebesi. Profil ini juga memuat berbagai macam data dan informasi seperti kependudukan, mata pencaharian, kelembagaan, aktivitas perekonomian dan sumberdaya wilayah pesisir.

Untuk mendukung program evaluasi pengembangan program daerah perlindungan laut ini, digunakan beberapa indikator pemantauan, yaitu persen penutupan karang dan indikator biologi (ikan target) untuk mengetahui dampak daerah perlindungan laut terhadap perbaikan lingkungan. Sedangkan untuk mengetahui dampak daerah perlindungan laut terhadap perbaikan sosial ekonomi masyarakat digunakan indikator hasil tangkapan nelayan. Pada tahap awal telah dilakukan survei yang dilakukan oleh pengelola daerah perlindungan laut dan masyarakat untuk mendapatkan data awal (kondisi awal) lokasi. Data awal ini digunakan sebagai data pembandingan dalam mengevaluasi program daerah perlindungan laut.

Pengembangan daerah perlindungan laut awalnya berasal dari kesadaran masyarakat untuk melindungi ekosistem terumbu karang. Hal ini didasarkan atas pemahaman masyarakat akan arti pentingnya ekosistem terumbu karang bagi kelangsungan hidup mereka. Masyarakat menyadari bahwa meningkatnya aktivitas yang merusak terumbu



karang akan berdampak pada musnahnya ekosistem tersebut. Kerusakan terumbu karang selanjutnya akan berdampak terhadap mata pencaharian mereka. Dengan demikian, hubungan sebab akibat dari keberadaan ekosistem terumbu karang dengan kondisi sosial ekonomi sangat dipahami oleh masyarakat dan Badan Pengelola Daerah Perlindungan Laut Pulau Sebesi.

2. Relevansi Program Daerah Perlindungan Laut dengan Kondisi dan Situasi Lokasi (nilai 3)

Sebagai masyarakat kepulauan, masyarakat Pulau Sebesi menyadari bahwa keberadaan terumbu karang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka, karena sebagian besar dari mereka yang hidup sebagai nelayan mencari ikan di kawasan ekosistem tersebut. Dengan demikian, perlindungan terhadap ekosistem terumbu karang melalui program daerah perlindungan laut akan melindungi mata pencaharian mereka. Dalam pengembangannya, daerah perlindungan laut mendapat dukungan penuh dari masyarakat Pulau Sebesi, terutama mereka yang berprofesi sebagai nelayan. Oleh karena itu, ketika inisiator program menyampaikan maksud dan tujuan dari program ini, masyarakat memberikan dukungannya. Pada awalnya, lokasi daerah perlindungan laut hanya difokuskan pada satu tempat, yaitu di depan Dusun Sianas, namun karena masyarakat dari dusun lain meminta, maka lokasi daerah perlindungan laut diperluas menjadi empat lokasi, yaitu masing-masing di dusun Tejang, dan dusun Segenom. Hal ini menunjukkan bahwa program daerah perlindungan laut ini merupakan kebutuhan masyarakat Pulau Sebesi.

3. Dampak Proyek terhadap Perbaikan Lingkungan, Ekonomi dan Perilaku Masyarakat (nilai 2)

Pengembangan daerah perlindungan laut Pulau Sebesi sampai saat ini baru menunjukkan dampak secara signifikan terhadap perubahan sikap masyarakat dalam mengelola sumberdaya pesisir dan penurunan tekanan terhadap sumberdaya tersebut. Hal ini terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam program daerah perlindungan laut dan keinginan mereka untuk melindungi wilayah perairan dari aktivitas yang bersifat destruktif, seperti penggunaan bom, potassium dan gardan. Sedangkan ditinjau dari segi lingkungan, dampak terhadap perbaikan lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat belum memberikan hasil yang signifikan. Hal ini dikarenakan program daerah perlindungan laut baru berjalan efektif selama 12 bulan, sehingga dampak terhadap perbaikan lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat belum dapat dievaluasi.

4. Penyebarluasan Informasi (nilai 2)

Meskipun program daerah perlindungan laut baru berjalan sekitar 12 bulan, namun berbagai kalangan telah banyak mengetahui tentang keberadaan program tersebut. Hal ini dikarenakan pengelola program ini giat menyebarluaskan berbagai informasi tentang program ini. Secara berkala informasi dari program daerah perlindungan laut disajikan pada media "Warta Pesisir dan Lautan" yang diterbitkan oleh PKSPL-IPB setiap 3 bulan. Selain itu, pengelola juga aktif menyebarluaskan melalui media cetak setempat seperti Lampung Pos dan media elektronik seperti TVRI stasiun Lampung. Penyebarluasan informasi juga dilakukan dengan mengundang pihak-pihak luar untuk melihat perkembangan program daerah perlindungan laut. Pihak luar yang telah diundang terutama *stakeholders* di Provinsi Lampung seperti Pemda (Dinas terkait), LSM dan media massa. Diharapkan dengan kedatangan *stakeholders* ini ke Pulau Sebesi dapat meningkatkan penyebaran informasi tentang program ini.

Dilihat dari aksesibilitas, untuk mencapai lokasi pengembangan daerah perlindungan laut di Pulau Sebesi ini relatif mudah, karena dapat ditempuh selama \pm 3 jam dari kota Bandar Lampung, yaitu 1,5 jam kendaraan darat dan 1,5 jam kendaraan laut. Transportasi umum ke lokasi ini juga tersedia secara reguler, dimana angkutan darat tersedia dari Kota Kalianda menuju Pelabuhan Canti. Sedangkan transportasi laut secara reguler tersedia dari pagi hingga siang hari.

Untuk mengetahui peluang kemungkinan replikasi dari program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi, pada Tabel 7 disajikan ringkasan penilaian aspek replikabilitas tersebut. Seperti terlihat pada Tabel 7, total nilai keempat parameter yang digunakan dalam menilai peluang replikasi adalah 2,50. Dengan demikian, peluang replikasi program ini berada pada kategori tinggi.

Tabel 7. Ringkasan penilaian replikabilitas program daerah perlindungan laut Pulau Sebesi

No	Parameter/variabel	Bobot	Skor	Jumlah
1.	Kelengkapan data dasar (<i>baseline data</i>)	0,30	3	0,90
2.	Relevansi program daerah perlindungan laut dengan kondisi dan situasi lokasi	0,20	3	0,60
3.	Dampak proyek terhadap perbaikan lingkungan, ekonomi dan perilaku	0,30	2	0,60
4.	Penyerbarluasan	0,20	2	0,40
Total		1,00		2,50



BAPPENAS

